

# LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT II TA 2019



## KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2019 dapat disusun tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Inspektorat II dalam melaksanakan tugas pengawasan intern dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai perwujudan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), media penilaian kinerja, media penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada pemangku kepentingan terkait, sebagai media hubungan kerja organisasi baik internal maupun eksternal, dan sebagai media informasi umpan balik dalam rangka perbaikan kinerja secara berkesinambungan

Secara umum sasaran yang dicapai telah sesuai dengan yang direncanakan, namun demikian terdapat beberapa capaian sasaran yang masih perlu ditingkatkan karena Inspektorat II dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan komitmen, kerjasama dan dukungan aktif dari unit kerja lain di lingkungan Badan POM.

Laporan Kinerja Inspektorat II 2019 ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Badan POM dan membantu kinerja pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* di masa yang akan datang melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja

Jakarta, 20 Februari 2020  
Inspektur II

Dra. Zulaimah, Apt., M.Si

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2019 merupakan perwujudan akuntabilitas Inspektorat II dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan ini memuat capaian kinerja tahun 2019 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang mengacu pada Keputusan Inspektur II Nomor B-HK.04.03.72.01.19.0294 tanggal 24 Januari 2019 tentang Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat II Badan POM Tahun 2019.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, Inspektorat II sebagai unit pendukung memiliki 8 Sasaran Strategis, yaitu: (1) Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai *Roadmap* RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II; (2) Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai *Trusted Advisor*; (3) Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN; (4) Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II; (5) Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II; (6) Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II; (7) Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai *Roadmap* RB BPOM 2015-2019; (8) Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern.

Sasaran Strategis tersebut didukung oleh 17 (tujuh belas) Indikator Sasaran Capaian IKU Inspektorat II tahun 2019 sebagai berikut:

1. Nilai PMPRB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan, dengan capaian sebesar 96,96%.
2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan, dengan capaian sebesar 111,11%.
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penelusuran Pengaduan, dengan capaian sebesar 133,33%.
4. Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern, dengan capaian sebesar 98,87%.
5. Nilai PMPRB BPOM Yang di-Submit Secara *Online*, dengan capaian sebesar 99,92%.
6. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi RB BPOM, dengan capaian sebesar 133,33%.
7. Jumlah Unit Kerja Yang Memiliki Predikat WBK/WBBM Hasil Evaluasi Internal, dengan capaian sebesar 91,67%.
8. Persentase Realisasi Rencana Aksi RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan, dengan capaian sebesar 108,7%.
9. Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKPN Tepat Waktu, dengan capaian sebesar 100%.
10. Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN Tepat Waktu, dengan capaian sebesar 117,42%.

11. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Gratifikasi Tepat Waktu, dengan capaian sebesar 98,93%.
12. Tingkat Keandalan SPIP Pada Mitra Kerja, dengan capaian sebesar 92,94%.
13. Jumlah Laporan Pengawasan Intern Pada Mitra Kerja, dengan capaian sebesar 100%.
14. Persentase Laporan Keuangan Satker Yang Bebas Dari Kesalahan Material, dengan capaian sebesar 100%.
15. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan *Intern*, dengan capaian sebesar 101,18%.
16. Nilai AKIP, dengan capaian sebesar 96,77%.
17. Level Kapabilitas APIP, dengan capaian sebesar 100%.

Dari 17 (tujuh belas) indikator di atas, target tercapai dengan capaian diatas 100% dengan kriteria baik adalah persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan, Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern. Target dengan capaian diatas 110% dengan kriteria sangat baik adalah persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan dan persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai Sasaran Strategis dan IKU serta membiayai kegiatan lainnya, Inspektorat II memperoleh anggaran TA 2019 sebesar Rp.6.690.890.000,00 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.6.602.446.974,00 dengan pencapaian sebesar 98,68%.

Laporan Kinerja Inspektorat II ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kinerja Inspektorat II pada tahun 2019 dan untuk selanjutnya dapat memberi masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II di masa yang akan datang.



D  
A  
F  
T  
A  
R

I  
S  
I



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR BAGAN .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Gambaran Umum Organisasi .....	1
B. Struktur Organisasi .....	4
BAB II .....	7
PERENCANAAN KINERJA .....	7
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 .....	7
1. Visi .....	7
2. Misi .....	7
3. Tujuan Strategis .....	8
4. Sasaran Strategis .....	9
5. Strategi .....	11
6. Program .....	13
7. Rencana Kinerja Tahunan 2019 .....	13
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 .....	14
1. Target Indikator Kinerja .....	14
2. Cara Hitung Capaian Indikator .....	15
BAB III .....	18
AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
A. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Kinerja Tahun 2018 .....	18
B. Capaian Kinerja Organisasi .....	19
I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 .....	19
II. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	24
C. Realisasi Anggaran .....	58
D. Analisis Efisiensi Kegiatan .....	62
BAB IV .....	67
PENUTUP .....	67

A. Kesimpulan..... 67

B. Saran..... 70

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Utama .....	4
Bagan 2. 1 Tujuan dan Indikator Tujuan .....	9
Bagan 2. 2 <i>Balance Score Card</i> Inspektorat II .....	11

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman .....	4
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2019.....	15
Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat II Tahun 2019 .....	20
Tabel 3. 2 Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif <i>Balance Score Card</i> Inspektorat II Tahun 2019.....	22
Tabel 3. 3 Tren Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif <i>Balance Score Card</i> .....	23
Tabel 3. 4 Capaian Sasaran 1 .....	26
Tabel 3. 5 Capaian Sasaran 2 .....	31
Tabel 3. 6 Capaian Sasaran 3 .....	34
Tabel 3. 7 Capaian Sasaran 4 .....	39
Tabel 3. 8 Capaian Sasaran 5 .....	45
Tabel 3. 9 Capaian Sasaran 6 .....	49
Tabel 3. 10 Capaian Sasaran 7 .....	53
Tabel 3. 11 Capaian Sasaran 8 .....	56
Tabel 3. 12 Level Kapabilitas APIP .....	57
Tabel 3. 13 Capaian Anggaran 2019 .....	59
Tabel 3. 14 Tingkat Efisiensi .....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Rencana Strategis Inspektorat II BPOM Tahun 2015-2019 .....	73
Lampiran 2 - Indikator Kinerja Utama Inspektorat II Tahun 2018-2019.....	75
Lampiran 3 - Perjanjian Kinerja 2019.....	78
Lampiran 4 - Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat II BPOM Tahun 2019 .....	83
Lampiran 5 - Nilai Perbandingan PMPRB Tahun 2018 dan 2019.....	86
Lampiran 6 - Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2019 .....	87
Lampiran 7 - Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Per Triwulan Inspektorat II .....	92
Lampiran 8 - Pengukuran Kinerja Kegiatan Inspektorat II Tahun 2019 .....	96
Lampiran 9 - Perbandingan Realisasia Tahun 2015 - 2019 terhadap Target Renstra 2019 ..	105
Lampiran 10 - Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Mitra Inspektorat II 2019 .....	110
Lampiran 11 - Hasil Penilaian PM-EPITE Tahun 2019 .....	111
Lampiran 12 - Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2019 .....	112
Lampiran 13 - Monitoring Status Temuan Audit Inspektorat Badan POM Tahun Audit s.d Tahun 2019 Per 31 Desember 2019 .....	113
Lampiran 14 - Realisasi Pelatihan Pegawai Inspektorat Tahun 2019 .....	117
Lampiran 15 - Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2019 .....	120

# BAB I

## Pendahuluan

**A. Gambaran Umum Organisasi**

**B. Struktur Organisasi.**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum Organisasi**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan *stakeholder*.

Inspektorat II sebagai salah satu bagian dari Unit Kerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Inspektorat Badan POM memiliki kewajiban untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pada setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat II Tahun 2019 merujuk kepada Rencana Strategis Inspektorat II Tahun 2015-2019 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2019.

Badan POM ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan POM, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM.

Inspektorat II sebagai APIP sesuai perubahan fungsi pengawasan dalam manajemen Badan POM dari *watch dog* menjadi *trusted advisor* yang dapat memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan Badan POM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja Badan POM. APIP diharapkan menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Dengan demikian diharapkan semua unit kerja di lingkungan Badan POM dapat tumbuh budaya untuk transparansi, berpartisipasi, dan berakuntabilitas.

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat II Badan POM adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan POM.
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan POM.
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan POM yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Inspektorat II dalam melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal harus dapat mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai (*controllable*) dan berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya relatif kurang dikuasai (*uncontrollable*) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Identifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) telah memberikan pandangan bagi Inspektorat II Badan POM bahwa permasalahan yang timbul dari keadaan lingkungan dalam dan luar Inspektorat II adalah sebagaimana tertuang dalam tabel yang berisikan kata-kata kunci berikut ini:

Kekuatan ( <i>Strengths - S</i> )	Kelemahan ( <i>Weaknesses - W</i> )
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor dengan Sertifikasi JFA</li> <li>2. Pedoman Operasi Baku/ ISO 9001:2015 dan pedoman pengawasan lainnya</li> <li>3. Komitmen Pimpinan</li> <li>4. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3</li> <li>5. Integrasi SPIP dengan Sistem Manajemen Mutu/<i>Quality Management System</i> (QMS) ISO 9001:2015 dan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SDM kurang memadai</li> <li>2. Kompetensi teknis belum merata</li> <li>3. Belum adanya sistem informasi pengawasan yang terintegrasi</li> <li>4. Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik</li> </ol>
Peluang ( <i>Opportunities - O</i> )	Ancaman ( <i>Threats - T</i> )
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Political will</i> pemerintah untuk mewujudkan <i>good governance</i> yang mempunyai peran pengawasan dan posisi strategis dalam system manajemen pembangunan nasional yang cukup tinggi</li> <li>2. Perubahan paradigma pengawasan internal dimana APIP sebagai mitra auditee menjadikan APIP berperan sebagai <i>trusted advisor</i></li> <li>3. Pemanfaatan satgas SPIP Pusat dan satgas Laporan Keuangan (LK) secara optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitra kerja yang kurang memahami peran pengawasan internal</li> <li>2. Belum adanya peraturan perundang-undangan terkait pengawasan internal</li> </ol>

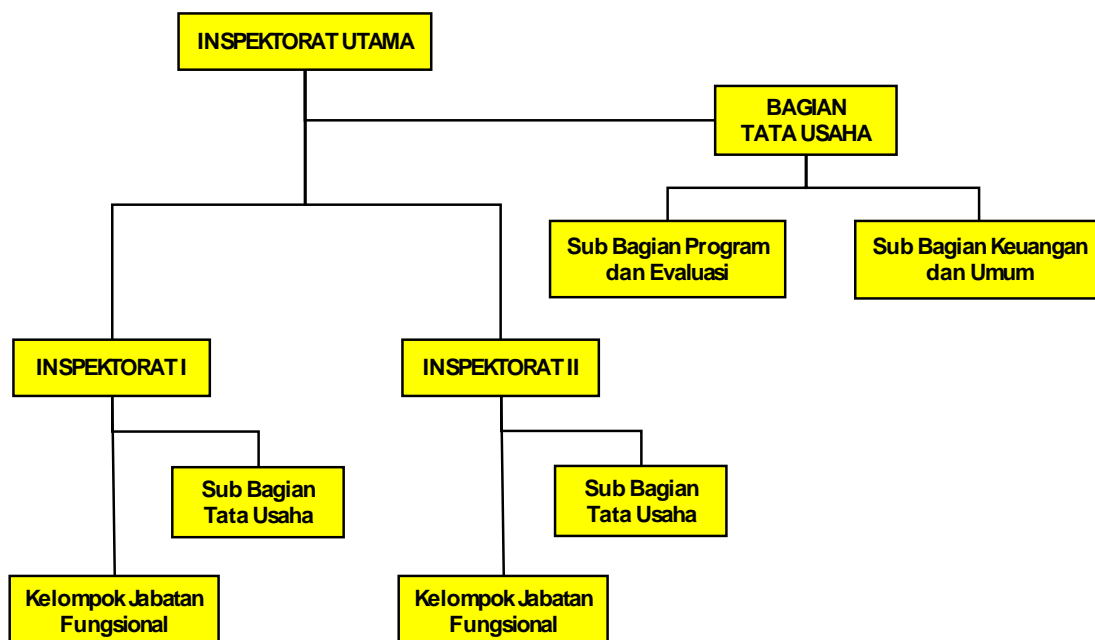
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah fungsi pengawasan	
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan	

Tabel 1. 1 Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

## B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan POM. Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kedudukan Inspektorat II Badan POM secara umum dapat dilihat pada bagan berikut:

**Bagan Organisasi Inspektorat Utama**



**Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Utama**

Sebagai bagian dari Inspektorat Utama, Inspektorat II memiliki tugas, peran dan fungsi:

1. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan.
2. Penyusunan rencana program pengawasan intern.
3. Pengawasan intern terhadap keuangan dan kinerja melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
4. Pelaporan hasil pengawasan.

#### 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat II sesuai dengan tugas, peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat II Badan POM pada akhir Desember tahun 2019 terdiri dari 26 orang pegawai dan 5 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/Pramubakti dengan uraian sebagai berikut:

- |  |            |
|--|------------|
| a. Eselon II                           | : 1 Orang  |
| b. Eselon IV                           | : 1 Orang  |
| c. Jabatan Fungsional Auditor          | : 13 Orang |
| d. PFM Madya                           | : 1 Orang  |
| e. Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya | : 10 Orang |
| f. PPNPN/Pramubakti                    | : 5 Orang  |



# *BAB II*

## Perencanaan Kinerja

**A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019**

**B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Rencana strategis Inspektorat II mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM yang dapat dilihat pada Lampiran 1. Adapun Visi – Misi Inspektorat II tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

##### 1. Visi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat II mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu **Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa**. Visi Inspektorat II adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Inspektorat II pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peran dan fungsi Inspektorat II. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat II adalah sebagai berikut:

**Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa**

##### 2. Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat II adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat II. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh

Inspektorat II dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Inspektorat II menetapkan misi sebagai berikut:

- 1 •Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
- 2 •Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
- 3 •Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Inspektorat II secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

Dengan telah ditetapkannya visi dan misi tersebut, Inspektorat II mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi Badan POM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

### 3. Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat II, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Rencana Strategis dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat II adalah sebagai berikut:



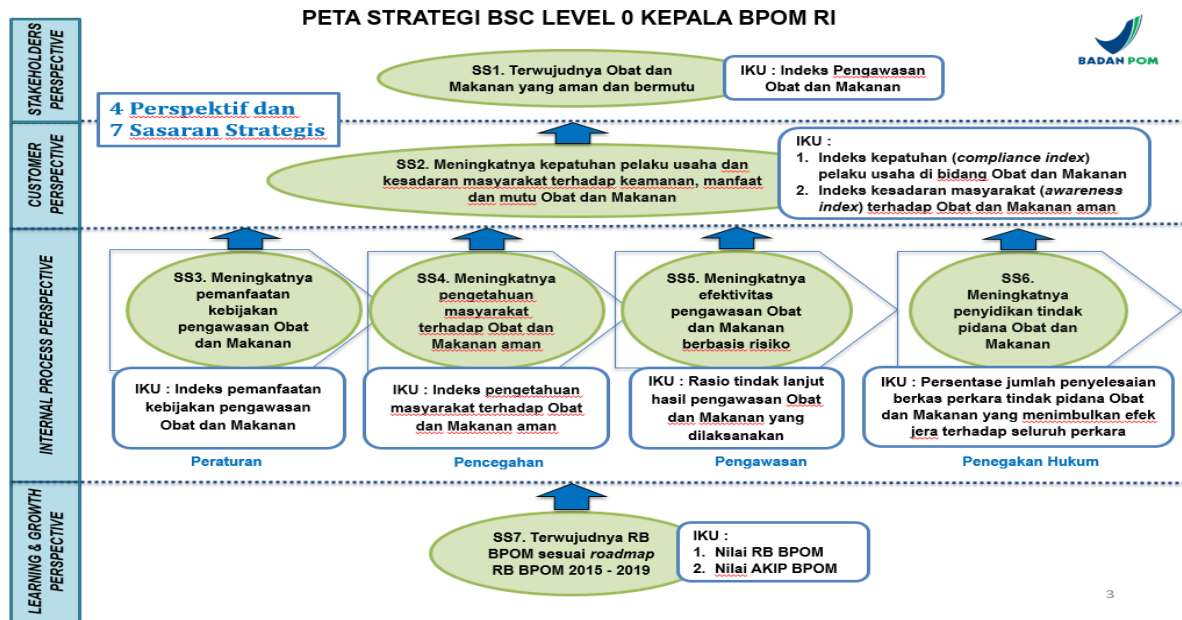
**Bagan 2. 1 Tujuan dan Indikator Tujuan**

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat II melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat II memiliki peran penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui pengawasan terhadap implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

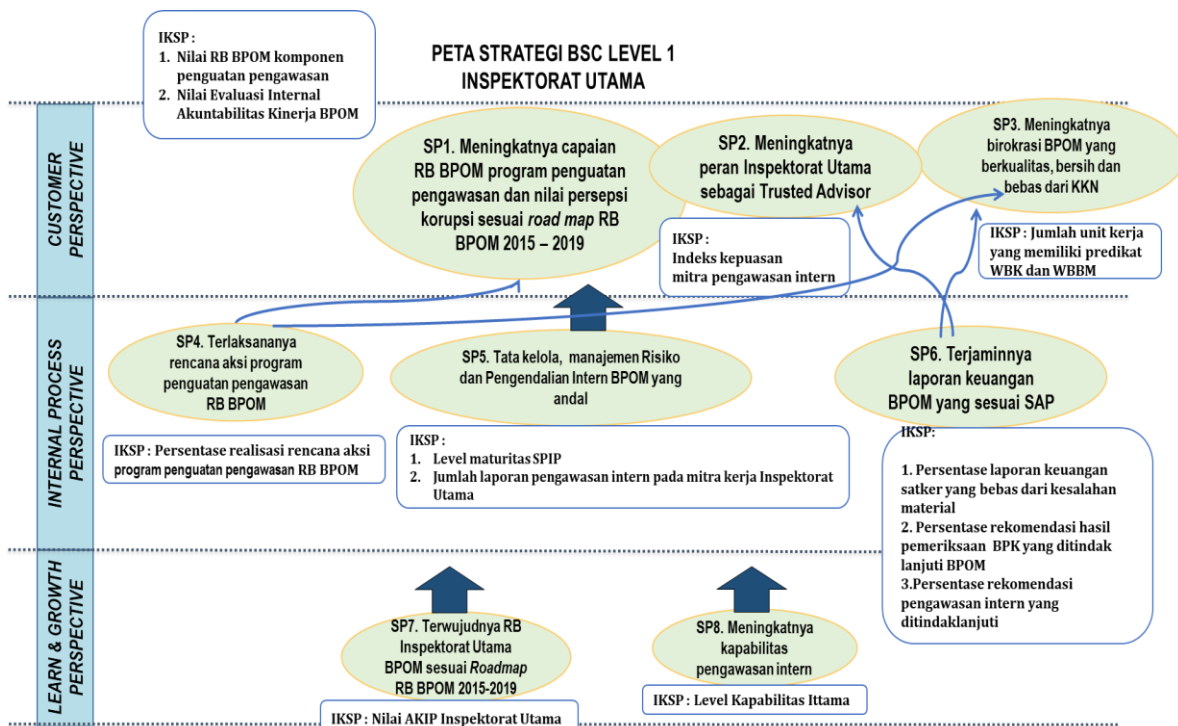
#### 4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis kegiatan Inspektorat II disusun berdasarkan Visi dan Misi Badan POM yang dituangkan dalam Peta Strategi Level Badan POM yang diturunkan dalam Peta Strategi Level Inspektorat Utama dan selanjutnya menjadi turunan dalam Peta Strategi Inspektorat II. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai Revisi Rencana Strategis Inspektorat II tahun 2015 – 2019 yang diharapkan akan dapat mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana bagan peta strategis berikut:

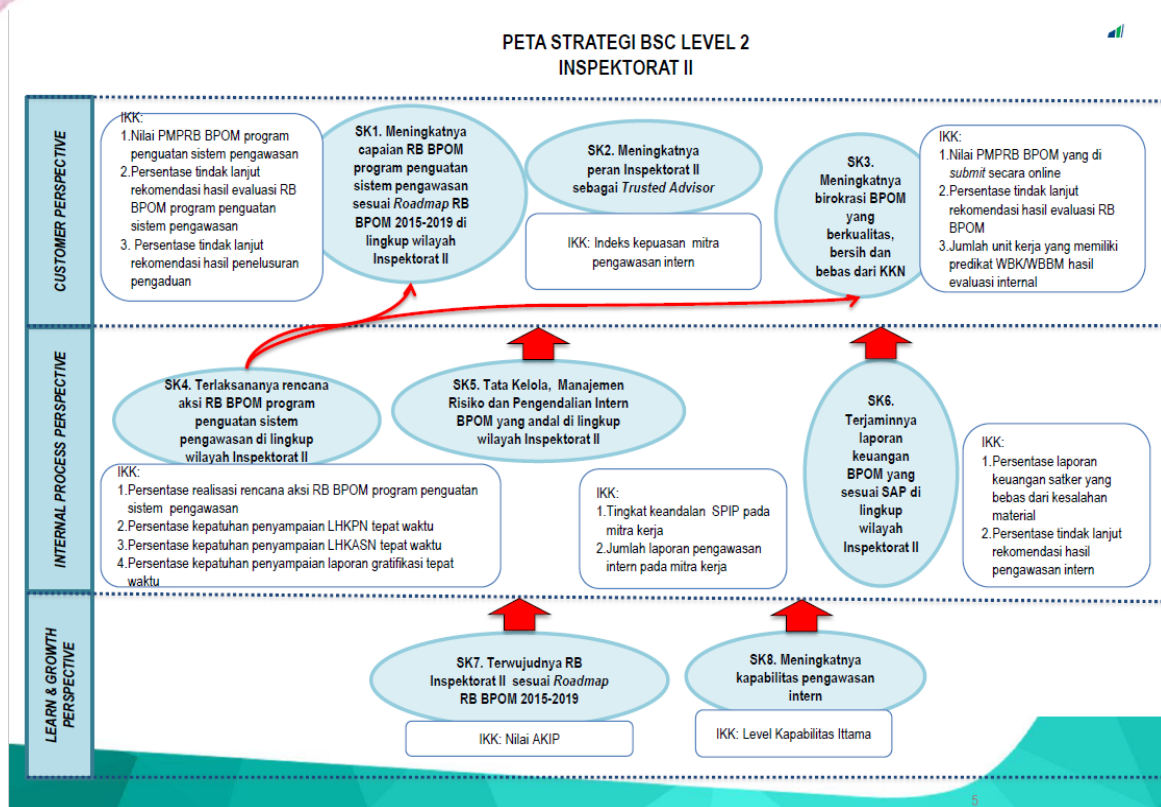
Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai. Rincian sasaran sebagai berikut:



**Bagan Balance Score Card Kepala BPOM**



**Bagan Balance Score Card Inspektorat Utama**



**Bagan 2. 2 Balance Score Card Inspektorat II**

**Bagan 2.2. Balance Score Card Badan POM, Inspektorat Utama dan Inspektorat II**

Sebagai bagian dari Unit Kerja di lingkungan Badan POM, Inspektorat II harus mendukung sasaran strategis pada tingkat Kepala Badan POM seperti disajikan dalam Bagan 2.2. Sasaran Kegiatan (SK) lingkup Inspektorat II mendukung seluruh capaian kinerja level Inspektorat Utama pada setiap Sasaran Program (SP) dan capaian kinerja Kepala Badan POM khususnya pada SS.7 Terwujudnya RB Badan POM sesuai *Roadmap* RB Badan POM.

## 5. Strategi

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran diperlukan, strategi yang harus dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Unit Kerja yang berpredikat WBK/WBBM.
2. Dinamika perubahan suprasistem terkait pengawasan intern dapat meningkatkan nilai hasil survei kepuasan mitra pengawasan intern.
3. Peningkatan Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern.

4. Pengembangan teknik pengawasan berbantuan komputer dalam mempertahankan opini WTP untuk mengikuti perkembangan dinamika perubahan kebijakan suprasistem.
5. Peningkatan Peran APIP sebagai *trusted advisor*.
6. Pendampingan penyusunan laporan keuangan.
7. Intervensi kesenjangan kompetensi sehingga mampu menyesuaikan dinamika perubahan suprasistem terkait pengawasan intern.
8. Digitalisasi pengawasan intern dengan memanfaatkan *big data analytic artificial intelligent*.
9. Mengikuti diklat CISA untuk memahami proses *E-Government*.
10. Mempertahankan reputasi yang baik dalam hal menjalin jejaring kerja yang baik dengan stakeholder.
11. Membuat regulasi pengawasan intern untuk fasilitasi pelaksanaan implementasi *E-government* Badan POM.
12. Penguatan kebijakan dan kelembagaan fungsi APIP sebagai *trusted advisor*.
13. Membangun sistem informasi manajemen pengawasan intern dan pustaka audit yang terintegrasi.
14. Peningkatan pemahaman auditor atas proses bisnis BPOM serta kebijakan pemerintah yang mengutamakan reformasi birokrasi/WBK, tatakelola dan pengendalian intern dan manajemen risiko.
15. Lingkungan organisasi yang telah mempunyai budaya kerja dan memiliki kompetensi mampu menangkap peran APIP sebagai *trusted advisor*.
16. Penyusunan dan implementasi peraturan Badan POM tentang prioritas pelaksanaan penyusunan berbasis resiko.
17. Komitmen pimpinan dalam mempertahankan opini WTP
18. Kebijakan penggunaan teknik audit dan pengawasan intern berbantuan komputer.
19. Peningkatan kualitas dan kuantitas anggaran pengawasan intern berbasis kinerja dan resiko.
20. Penguatan komitmen dan peningkatan kompetensi *auditee* atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

## 6. Program

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat II dirangkum dalam Program yaitu:

### Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program diselenggarakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat II yang telah ditetapkan sebelumnya. Rumusan strategi ke dalam bentuk yang lebih operasional dalam mencapai visi, misi dan tujuan dan sasaran berupa kegiatan **Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II** yang terdiri dari komponen:

Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II

- a. Pelaksanaan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II.
- b. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- c. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko.
- d. Implementasi RB Bidang Penguatan Pengawasan.
- e. Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM.
- f. Implementasi *Quality Management System*
- g. Pengelolaan *Human Capital Management* (HCM).
- h. Operasional Pengawasan Intern Inspektorat II.

## 7. Rencana Kinerja Tahunan 2019

Inspektorat II telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2019. Selain itu, Inspektorat II juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran yang dapat dilihat pada Lampiran 3.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM, sebagai pelaksanaannya diterbitkanlah Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM. Pada pasal 361 s.d. 377 dijelaskan tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Utama yang mengatur perubahan Inspektorat yang secara struktural menjadi Inspektorat Utama. Berdasarkan peraturan tersebut, Inspektorat Utama terdiri dari 2 (dua) Unit Kerja Eselon II yaitu Inspektorat I dan Inspektorat II.

### 1. Target Indikator Kinerja

Inspektorat II telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai acuan dalam melakukan kinerja selama 1 (satu) tahun. Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2019 merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut mencakup sasaran strategis dan indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut serta target yang ditetapkan untuk dicapai dalam 1 (satu) tahun. Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2019 dapat dilihat dalam Lampiran 4 dan telah dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 INSPEKTORAT II

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11,5
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	75%
2	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara <i>online</i>	90,5
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	75%
		Pengawalan Unit Kerja BPOM menuju predikat WBK/WBBM	12
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92%
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	100%
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	85%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	85%
5	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	85
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23
6	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%
7	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	81
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Level 3

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2019

## 2. Cara Hitung Capaian Indikator

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja:

Kriteria	Rentang Capaian Lapkin 2019
Sangat Kurang	<50
Kurang	50 - <70
Cukup	70 - <90
Baik	90 - <110
Sangat Baik	110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	> 120

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

**Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:**

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

**Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:**

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien

Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

# *BAB III*

## Akuntabilitas Kinerja

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

**B. Realisasi Anggaran**

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Kinerja Tahun 2018

##### I. Langkah-langkah dalam rangka meningkatkan capaian

1. Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian kinerja sasaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja serta adanya pembagian personil sebagai penanggung jawab dalam pencapaian target kinerja.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun 2019 dengan data capaian RHPK, RAPK dan pemantauan sasaran mutu melalui aplikasi *e-performance* secara bulanan dan triwulanan. Adapun terkait pengumpulan dan pengelolaan data kinerja telah ditetapkan personil yang ditugaskan sebagai penanggungjawab kinerja melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.21.03.19.0765 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan POM Tahun 2019.

*Output* tim tersebut sebagai berikut:

- a. Pemutakhiran data pada aplikasi Monev setiap bulan untuk Kementerian Keuangan, LKPP, Bappenas, dan setiap triwulan untuk *e-performance*.
  - b. Laporan data hasil kegiatan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan.
2. Perlu dilakukan reviu terhadap indikator kinerja dan penentuan dasar penetapan target didasarkan pada *baseline* data yang telah ada.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun 2019 dengan hasil reviu indikator kinerja yang dilaksanakan pada:

- a. Tanggal 10 Januari 2019 tentang Evaluasi Anggaran, Capaian Kinerja 2018 dan Target Kinerja Tahun 2019.
- b. Tanggal 17 Juli 2019 tentang Rapat Tinjauan Manajemen Inspektorat II.
- c. Tanggal 12 Agustus 2019 tentang Rapat Evaluasi Kinerja Inspektorat Utama tahun 2019.

Adapun hasil reviu tersebut sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui pemenuhan rencana kebutuhan ASN dan rencana pengembangan kompetensi ASN.

- b. Peningkatan efektivitas tata kelola melalui penerapan proses bisnis.
  - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui penerapan manajemen risiko dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
3. Perlu segera membentuk satgas/komite audit yang bertugas melakukan pengawasan/reviu kegiatan pengawasan APIP untuk meningkatkan pencapaian pada sasaran ke-6, yaitu meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.72.12.18.5571 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penjamin Mutu Hasil Pengawasan Internal di Lingkungan Badan POM yang bertugas:

- a. Melakukan pengawasan atas penjaminan mutu hasil pengawasan internal.
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas yang membutuhkan akses data dan informasi Unit Eselon I.
- c. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan POM dan/atau Inspektur Utama dalam rangka perbaikan mutu hasil pengawasan internal, perbaikan kualitas keuangan Badan POM dan pelaksanaan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK RI.

*Output* Satuan Tugas Penjamin Mutu Hasil Pengawasan Internal adalah laporan hasil pengawasan internal di lingkungan Badan POM yang telah direviu oleh satuan tugas tersebut.

## **B. Capaian Kinerja Organisasi**

### **I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019 diketahui bahwa Inspektorat II memiliki 9 (sembilan) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Berdasarkan pengukuran capaian target yang telah diperjanjikan dalam PK, hasil pengukuran disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat II Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian Indikator (%)	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria	
<b>Stakeholder/Customer Perspective</b>							
1. Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	1.	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem Pengawasan	11,5	11,15	96,96	Baik	
	2.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem Pengawasan	90%	100%	111,11	118,64	Sangat Baik
	3.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	75%	100%	133,33		Tidak dapat disimpulkan
2. Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	4.	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	81,07	98,87	98,87	Baik
3. Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	5.	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	90,5	90,43	99,92		Baik
	6.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	75%	100%	133,33	108,30	Tidak dapat disimpulkan
	7.	Pengawalan Unit Kerja BPOM menuju predikat WBK/WBBM	12	11	91,67		Baik
<b>Internal Process Perspective</b>							
4. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	8.	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92%	100%	108,7		Baik
	9.	Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	100%	100%	100	102,08	Baik
	10.	Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	85%	99,81%	117,42		Sangat Baik
	11.	Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	85%	84,09%	98,93		Baik
5. Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	12.	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	85%	79%	92,94	96,47	Baik
	13.	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23	23	100		Baik

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Nilai Capaian Indikator (%)	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria
6.	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	14.	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100	100,58	Baik
		15.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%	86%	101,18		Baik
<i>Learn and Growth Perspective</i>								
7.	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	16.	Nilai AKIP	81	78,38	96,77	96,77	Baik
8.	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	17.	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100	100	Baik

Dari tabel 3.1 diketahui bahwa dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja sasaran, 10 (sepuluh) indikator berhasil mencapai target sesuai yang direncanakan sedangkan 7 (tujuh) indikator tidak berhasil mencapai target. Selain itu diketahui juga terdapat 2 indikator dengan capaian lebih dari 120% sehingga tidak dapat disimpulkan yaitu pada indikator:

1. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan;
2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM;

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat II tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat II adalah sebesar 102,87. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut.

**Tabel 3. 2 Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card* Inspektorat II Tahun 2019**

Perspektif	Sasaran Program	Nilai Pencapaian Sasaran	Nilai Kinerja Perspektif	Bobot	Nilai Kinerja Organisasi
a	b	c	d	e	f=(dxe)
<b>Customer</b>	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	118,64%	108,60%	40%	43,44
	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	98,86%			
	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	108,30%			
<b>Internal Process</b>	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	102,08%	99,71%	30%	29,91
	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	96,47%			
	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	100,58%			
<b>Learning and Growth</b>	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	96,77%	98,38%	30%	29,51
	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	100%			
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>					<b>102,87</b>

Tabel 3-2 menyajikan informasi Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card*. Secara keseluruhan, capaian nilai tiap Sasaran Program untuk tiap Perspektif pada tahun 2019 sebesar 102,87% yang terdiri dari Nilai

Kinerja Perspektif *Customer* (108,60%); Nilai Kinerja Perspektif Internal Process (99,71%) dan Nilai Kinerja Perspektif *Learning & Growth* (98,38%). Nilai pada masing-masing perspektif tersebut kemudian dilakukan pembobotan untuk mengukur capaian kinerja organisasi. Setelah dilakukan perhitungan Nilai Kinerja Organisasi dengan Perspektif *Customer* dengan bobot 40%, Perspektif Internal Process dengan bobot 30% dan Perspektif *Learning & Growth* dengan bobot 30%, maka diperoleh Nilai Kinerja Organisasi adalah sebesar 102,87. Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat II selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 3. 3 Tren Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card***

Tahun	Nilai Kinerja Organisasi
2019	102.87
2018	99.67
2017	105.18
2016	104.44
2015	98.88

Pada tahun 2018, Badan POM mengalami perubahan organisasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM. Inspektorat Utama mengalami peningkatan eselonisasi menjadi setingkat eselon I (Inspektorat Utama). Perubahan struktur organisasi berpengaruh pula pada perubahan perencanaan strategis, perubahan peta strategis dan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Beberapa Indikator Kinerja Utama tidak lagi mengukur *output*, namun mengukur capaian *outcome* dan *uncontrolable*.

Peningkatan Nilai Kinerja di tahun 2019 bila dibandingkan tahun 2018 disebabkan karena terdapat peningkatan capaian pada sasaran program:

1. "Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II". Hal ini disebabkan karena meningkatnya capaian indikator "Persentase tindak

lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan” yang semula 50% pada tahun 2018 menjadi 100% di tahun 2019;

2. “Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II”. Hal ini disebabkan karena meningkatnya capaian indikator
  - a. “Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan” yang semula 90% pada tahun 2018 menjadi 100% di tahun 2019.
  - b. “Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu” yang semula 72,27% pada tahun 2018 menjadi 99,81% di tahun 2019.
  - c. “Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu” yang semula 66% pada tahun 2018 menjadi 84,09% di tahun 2019;
3. “Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II”. Hal ini disebabkan karena meningkatnya capaian indikator “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern” yang semula 81,1% pada tahun 2018 menjadi 86% di tahun 2019.

Berdasarkan uraian diatas, hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2019 perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan target untuk tahun 2020-2024 dengan memperhatikan *baseline* data hasil capaian indikator periode akhir Rencana Strategis dan Laporan Kinerja tahun 2019 jika indikator tersebut masih tetap akan digunakan untuk menilai sasaran pada Rencana Strategis 2020-2024. Penjelasan Capaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat II tahun 2019 secara detil akan disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja berikut ini.

## II. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Penjelasan mengenai masing-masing sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran 1 “Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II”.**

Sasaran strategis ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

- a. Indikator kinerja ke 1 (satu) “Nilai PMPRB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan”.
  - 1) Definisi Operasional Indikator

“Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Badan POM sebelum dilakukan evaluasi penilaian pelaksanaan RB oleh Tim Evaluator Kemenpan RB”
  - 2) Cara Perhitungan Capaian Indikator

“Nilai PMPRB didapat dari komponen pengungkit penguatan sistem pengawasan dengan bobot 12%”.
- b. Indikator kinerja ke 2 (dua) “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan”.
  - 1) Definisi Operasional Indikator

“Proses tindak lanjut sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi dengan menghilangkan penyebab dan mengurangi akibat dari kelemahan/kekurangan yang ada”
  - 2) Cara Perhitungan Capaian Indikator

“Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai saran/jumlah total rekomendasi x 100%”
- c. Indikator kinerja ke 3 (tiga) “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan”.
  - 1) Definisi Operasional Indikator

“Pengelolaan dan tindaklanjut setiap laporan pengaduan yang terjadi di lingkungan Badan POM berupa dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai Badan POM atas layanan yang diberikan”
  - 2) Cara Perhitungan Capaian Indikator

“Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan / jumlah rekomendasi hasil penelusuran pengaduan x 100%”.

Sasaran	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019			Realisasi 2019 terhadap 2017 (%)	Realisasi 2019 terhadap 2018 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Renstra 2019 (%)
				Target (PK)	Realisasi	% Capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11)= (6)/(10)
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015- 2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11,05	11,38	11,5	11,15	96,96	100,90	97,97	11,5	96,96
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	100%	100%	90%	100%	111,11	100	100	90%	111,11
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	N/A	50%	75%	100%	133,33	N/A	200	75%	133,33

Tabel 3. 4 Capaian Sasaran 1

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

- 1) Indikator kinerja pertama yaitu “Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan” dengan capaian 96,96% dengan kategori baik. Realisasi indikator tahun 2019 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 adalah 97,97% dan bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2015-2019 adalah 96,96%.

- A. Dalam rangka meningkatkan pencapaian target kinerja tersebut, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat II antara lain:
1. Meningkatkan komitmen Pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. Pembentukan Tim RB Badan POM melalui Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.01.1.22.04.19.1370 tahun 2019 yang telah melibatkan seluruh Unit Kerja di Badan POM
  3. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam implementasi Reformasi Birokrasi antara lain Kementerian PAN dan RB, BPKP, KPK, Ombudsman dan BPK.
  4. Melaksanakan rencana aksi sesuai *Road Map* RB Badan POM berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.24.08.15.4097 tahun 2015.
  5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.
  6. Pada tahun 2019 telah dilakukan *piloting/uji* coba implementasi modul Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) oleh BPKP yang selanjutnya digunakan dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko.
  7. Pada tahun 2019 sebanyak 7 (tujuh) Unit Kerja di Badan POM telah meraih penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu Balai Besar POM di Yogyakarta, Balai besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Pekanbaru, Balai Besar POM di Pontianak, Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor ONPP dan Zat Adiktif.
- B. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018, nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan tahun 2019 mengalami penurunan dikarenakan:

1. Keseluruhan komponen penilaian pada area penguatan pengawasan mengalami penurunan kecuali untuk sub area APIP
  2. Penurunan nilai tersebut disebabkan unit Eselon I belum maksimal dalam pelaksanaan PMPRB area penguatan pengawasan karena perubahan mekanisme PMPRB berdasarkan PerMenpan RB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PerMenpan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yang mengharuskan PMPRB dilaksanakan sampai level unit kerja eselon I sehingga belum dapat memberikan kontribusi maksimal pada PMPRB area pengawasan Badan POM.
- 2) Indikator kinerja kedua yaitu “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan” dengan capaian tahun 2019 adalah 111,11% dengan kategori sangat baik. Realisasi indikator tahun 2019 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 adalah 100% bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2015-2019 adalah 111,11%. Kunci keberhasilan capaian indikator tahun 2019 adalah:
- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Satuan Kerja/Unit Kerja/BB/BPOM dan K/L serta *stakeholder* lainnya.
  - b. Mengimplementasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada seluruh Unit Kerja dengan ditetapkannya Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.22.02.19.0761 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan RB Dalam Rangka Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM.
  - c. Melakukan bimbingan teknis kepada Unit Kerja dalam pemenuhan data dukung LKE ZI WBK/WBBM diantaranya dengan cara mendorong unit kerja melakukan inovasi, menindaklanjuti rekomendasi seluruh hasil pengawasan internal/eksternal, memberikan pelayanan prima dan meningkatkan integritas.

- d. Evaluasi Satuan Kerja/Unit Kerja/BB/BPOM yang akan ditetapkan sebagai WBK/WBBM dengan melakukan perbaikan pada komponen yang mendapatkan nilai kurang optimal.
  - e. Bimtek, intervensi dan evaluasi atas Satuan Kerja/Unit Kerja/BB/BPOM lainnya yang akan diusulkan sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM.
- 3) Indikator kinerja ketiga yaitu “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penelusuran Pengaduan” dengan capaian indikator kinerja adalah 133,33% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Realisasi indikator tahun 2019 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 adalah 200% dan bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2015-2019 adalah 133,33%. Kunci keberhasilan capaian indikator tahun 2019 adalah:
- a. Melakukan *desk* pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan bersama Pejabat Pembina Kepegawaian yang dalam hal ini diwakili oleh Biro Umum dan SDM.
  - b. Meningkatkan evaluasi internal atas efektifitas rekomendasi hasil penelusuran pengaduan untuk mendukung implementasi *reward and punishment* di lingkungan Badan POM.

Capaian indikator ini mencapai 133% disebabkan karena terdapat 5 (lima) pengaduan dengan jumlah total 7 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pejabat terkait.

Capaian indikator “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penelusuran Pengaduan” Inspektorat II adalah 133,33% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Bila dibandingkan dengan capaian Inspektorat I sebesar 111,11% dengan kategori sangat baik. Capaian indikator Inspektorat II lebih baik dibandingkan dengan capaian indikator Inspektorat I disebabkan karena jumlah pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat II sampai dengan diberikannya rekomendasi lebih banyak jika dibandingkan dengan Inspektorat I.

Berdasarkan capaian kinerja pada indikator 1, 2 dan 3 tersebut diatas, diketahui bahwa jika dibandingkan antara target dengan hasil capaian kinerja pada periode berakhirnya Rencana Strategis tahun 2015-2019, rata-rata capaian indikator kinerja adalah 118,64% dengan kategori sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran 1 “Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II” berhasil dicapai.

## 2. Sasaran II “Meningkatnya Peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor”.

Sasaran strategis ini diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu indikator ke 4 (empat) “Indeks kepuasan mitra pengawasan intern”.

### 1) Definisi Operasional Indikator

“Suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama”

### 2) Cara Perhitungan Capaian Indikator

- 1) Survei dilaksanakan secara acak dengan mengirimkan kuesiner kepada Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja;
- 2) Responden mengisi untuk setiap pertanyaan yang diberikan;
- 3) Pengisian jawaban menggunakan scala likert 1 sd 5;
- 4) Dilakukan perhitungan dan rekapitulasi nilai;
- 5) Nilai rata-rata x 20;
- 6) Diperoleh nilai indeks kepuasan mitra pengawasan intern (*Trusted Advisor*).

Sasaran	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019			Realisasi 2019 terhadap 2017 (%)	Realisasi 2019 terhadap 2018 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap Target Renstra 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =	(8) =	(9) =	(10)	(11)=

						(6)/(5)	(6)/(3)	(6)/(4)		(6)/(10)
Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	84,31	81,35	82	81,07	98,87%	96,15	99,65	82	98,87%

**Tabel 3. 5 Capaian Sasaran 2**

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

Indikator kinerja ke empat yaitu “Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern” dengan capaian tahun 2019 adalah 98,87% dengan kategori baik. Realisasi indikator kinerja tahun 2019 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 adalah 99,65% dan bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2015-2019 adalah 98,87%. Data perhitungan Indeks kepuasan mitra seperti terlampir pada lampiran 5. Realisasi capaian indikator kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan karena kurangnya ketepatan tim audit dalam memberikan solusi/pemecahan masalah serta adanya perbedaan persepsi antar auditor dalam membaca permasalahan dan memberikan rekomendasi. Dalam rangka meningkatkan realisasi capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat II antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi teknis substantif maupun sertifikasi Auditor.
- b. Melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri untuk meningkatkan kompetensi serta menyamakan persepsi.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penguatan koordinasi dan komunikasi antara Auditor dan *Auditee* salah satunya menggunakan aplikasi sistem informasi monitoring secara elektronik dan dashboard evaluasi kinerja (SIMOLEKDESI) yang digunakan untuk pelaksanaan monitoring tindaklanjut hasil audit BPK dan Inspektorat II, evaluasi manajemen resiko dan evaluasi SAKIP.
- d. Meningkatkan pelayanan dengan memberikan konsultasi melalui sistem teknologi informasi melalui aplikasi saluran online layanan untuk konsultasi (SOLUSI).

- e. Pembahasan hasil audit melalui mekanisme ekspose hasil audit dengan Inspektur Utama BPOM.

Berdasarkan capaian kinerja pada indikator 4 tersebut diatas, diketahui bahwa jika dibandingkan antara target dengan hasil capaian kinerja pada periode berakhirnya Rencana Strategis tahun 2015-2019 rata-rata capaian indikator kinerja adalah 98,86% dengan kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran 2 “Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai *Trusted Advisor*” berhasil dicapai.

Capaian indikator “Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern” Inspektorat II adalah 98,87% dengan kategori baik. Bila dibandingkan dengan capaian Inspektorat I sebesar 99,74% dengan kategori sangat baik. Capaian indikator Inspektorat I lebih baik dibandingkan dengan capaian indikator Inspektorat II. Hal ini disebabkan karena berdasarkan jumlah responden yang dilakukan survei jumlah responden Inspektorat II lebih banyak dibanding dengan jumlah responden Inspektorat I, sehingga bilangan pembagiya berpengaruh terhadap hasil akhir survei. Selain itu masih terdapat beberapa hal yang secara internal harus di perbaiki di Inspektorat II seperti kendala terkait perbedaan persepsi auditor yang telah diminamilis dengan pelaksanaan PKS dan ekspose hasil audit.

### 3. Sasaran III “Meningkatnya Birokrasi BPOM Yang Berkualitas, Bersih dan Bebas Dari KKN”.

Sasaran strategis ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

- 1) Indikator kinerja ke 5 (lima) “Nilai PMPRB BPOM yang di-*submit* secara *Online*”.

#### A. Definisi Operasional Indikator

“Nilai pencapaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada komponen pengungkit dan komponen hasil yang dilakukan secara mandiri (*self assesement*) oleh Kementerian/Lembaga.”

#### B. Cara Perhitungan Capaian Indikator

Nilai PMPRB didapat dari penjumlahan antara komponen pengungkit (bobot 60%) dan komponen hasil (bobot 40%):

- a. Komponen pengungkit terdiri dari:
  1. Manajemen perubahan (5%)
  2. Penataan peraturan perundang-undangan (5%)
  3. Penataan dan penguatan organisasi (6%)
  4. Penataan Tatalaksana (5%)
  5. Penataan Sistem Manajemen SDM (15%)
  6. Penguatan Akuntabilitas (6%)
  7. Penguatan Pengawasan (12%)
  8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6%)

- b. Komponen hasil terdiri dari:
  1. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi (20%)
  2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%)
  3. Kualitas pelayanan publik (10%)

2) Indikator kinerja ke 6 (enam) “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi RB BPOM”.

A. Definisi Operasional Indikator

“Proses tindak lanjut rekomendasi (hal-hal yang masih perlu disempurnakan) berdasarkan hasil evaluasi RB dari Kementerian PAN dan RB yang dapat langsung ditindaklanjuti pada saat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target yang telah ditentukan di BPOM”

B. Cara Perhitungan Capaian Indikator

“Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai saran / Jumlah total rekomendasi x 100%”.

3) Indikator kinerja ke 7 (tujuh) “Pengawasan Unit Kerja BPOM menuju Predikat WBK/WBBM”.

A. Definisi Operasional Indikator

“Proses pendampingan unit kerja agar memenuhi persyaratan untuk mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM”

B. Cara Perhitungan Capaian Indikator

“Jumlah nilai bobot pada komponen pengungkit maksimal 60 % dan komponen hasil maksimal 40 %”.

Sasaran	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019			Realisasi 2019 terhadap 2017 (%)	Realisasi 2019 terhadap 2018 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Renstra 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11)= (6)/(10)
Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	88,7	89,55	90,5	90,43	99,92%	101,95%	100,98%	90,5	99,92%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	87,5%	89%	75%	100%	133,33 %	114,28%	112,35%	75%	133,33%
	Pengawasan Unit Kerja BPOM menuju Predikat WBK/WBBM	WBK:4 WBBM:0	WBK:13 WBBM:3	WBK/ WBBM: 12	WBK/ WBBM: 11	91,67%	% %	N/A	12	91,67%

**Tabel 3. 6 Capaian Sasaran 3**

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

- 1) Indikator kinerja ke 5 (lima) yaitu “Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara *online*” dengan realisasi capaian pada tahun 2019 adalah 99,92% dengan kategori baik. Realisasi indikator tahun 2019 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 adalah 100,98% dan bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2015-2019 adalah 99,92%. Pada tahun 2019 PMPRB tidak hanya dilaksanakan pada level Badan POM namun juga dilaksanakan pada level Unit Kerja Eselon I.

- A. Beberapa kendala yang mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian indikator tersebut adalah:
1. Keterbatasan waktu transisi mekanisme PMPRB 2.5 menjadi 4.0
  2. Kurang optimalnya peran dari Tim Pelaksana RB Badan POM dan Unit Kerja Eselon I serta Tim Assesor PMPRB dan Monev RB Badan POM Eselon I sehingga perlu intensifikasi dari Inspektorat Utama selaku Koordinator Assesor dan Monev RB Badan POM.
- B. Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan capaian indikator tersebut adalah:
1. Melakukan sosialisasi mekanisme PMPRB sesuai Surat Edaran dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Pengawasan Nomor B/70/PW.00/2019 perihal Penyampaian PMPRB dan Pengajuan Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2019.
  2. Melakukan asistensi PMPRB Unit Kerja Eselon I.
  3. Mengkoordinasikan pelaksanaan PMPRB di Lingkungan Badan POM dengan kegiatan:
    - a) Bimtek Asesor PMPRB dan Penyamaan Persepsi Mekanisme Kerja PMPRB tanggal 19 Februari 2019 yang diikuti oleh Tim Asesor PMPRB masing-masing area dan Auditor Internal di lingkungan Badan POM.
    - b) *Stand Up Meeting* dalam Rangka PMPRB pada 26 Februari s.d. 1 Maret 2019 mengundang Tim Pelaksana masing-masing area dalam rangka Pembahasan Rencana Aksi Monev dan Pengisian LKE PMPRB.
    - c) Pelaksanaan reviu terhadap pelaksanaan masing-masing Area Perubahan RB
    - d) *Forum Group Discussion* (FGD) Konsensus Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Badan POM pada tanggal 2 Mei 2019
  - 2) Indikator kinerja ke 6 (enam) “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM” dengan realisasi capaian pada 2019 adalah 133,33%. Realisasi indikator tahun 2019 bila dibandingkan dengan realisasi tahun

2018 adalah 112,35% dan bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis tahun 2015-2019 adalah 133,33%. Dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB Badan POM, Inspektorat Utama bertanggung jawab sebagai koordinator Asesor PMPRB dan Monev RB.

Kunci keberhasilan pencapaian indikator persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM adalah:

- a. Komitmen Pimpinan dan Tim Pelaksana yang kuat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi RB Badan POM.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB secara berkala.
- c. Pembentukan Tim RB Badan POM melalui Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.01.1.22.04.19.1370 tahun 2019 yang telah melibatkan seluruh Unit Kerja di Badan POM.

Capaian indikator ini mencapai 133,33% disebabkan karena terdapat 12 rekomendasi dari KemenPANRB yang telah ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana RB Badan POM.

- 3) Indikator kinerja ke 7 (tujuh) “Pengawasan Unit Kerja BPOM menuju Predikat WBK/WBBM” dengan realisasi capaian 91,67%. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2019, pada tahun 2018 indikator yang digunakan yaitu Jumlah Unit Kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal. Pada tahun 2019 Inspektorat II selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan pengawasan Unit Kerja Badan POM menuju predikat WBK/WBBM akumulasi pada 11 Unit Kerja yaitu:
  - a. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dengan nilai 85,95
  - b. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP dengan nilai 85,43
  - c. Direktorat Registrasi Pangan Olahan dengan nilai 90,32.
  - d. BBPOM di Surabaya dengan nilai 90,54.
  - e. BBPOM di Yogyakarta dengan nilai 91,14.
  - f. BBPOM di Denpasar dengan nilai 89,71.
  - g. BBPOM di Padang dengan nilai 89,35.

- h. BBPOM di Pekanbaru dengan nilai 86,38.
- i. BBPOM di Pontianak dengan nilai 83,61.
- j. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan nilai 86,94.
- k. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor ONPP dan Zat Adiktif dengan nilai 86,10.

Kunci keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Pengawasan Unit Kerja BPOM menuju Predikat WBK/WBBM adalah:

- a. Inspektorat Utama melakukan pembinaan yang efektif terhadap Unit Kerja dan pegawai pada Unit Kerja yang bersangkutan.
- b. Inisiatif dan komitmen yang tinggi Unit Kerja dalam rangka Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
- c. Keterlibatan seluruh pegawai dari masing-masing area perubahan yang melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Berdasarkan capaian kinerja pada indikator 5, 6 dan 7 tersebut diatas, diketahui bahwa jika dibandingkan antara target dengan hasil capaian kinerja dari awal periode pelaksanaan Renstra tahun 2015 sampai dengan periode berakhirnya tahun 2019 masing-masing indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran berhasil memenuhi capaian target setiap tahunnya dengan rata-rata capaian indikator kinerja adalah 108,30%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran 3 “Meningkatnya Birokrasi BPOM Yang Berkualitas, Bersih dan Bebas Dari KKN” berhasil dicapai.

#### **4. Sasaran IV “Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II”**

Sasaran strategis ini diukur menggunakan 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

- a. Indikator kinerja ke 8 (delapan) “Persentase Realisasi Rencana Aksi RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan”.
  - 1) Definisi Operasional Indikator

“Serangkaian rencana tindakan, tugas atau langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai target yang telah ditetapkan, mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan RB, dan memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana RB dengan membuat rencana aksi dan tindaklanjutnya”

2) Cara Perhitungan Capaian Indikator

“Jumlah realisasi rencana aksi / Jumlah rencana aksi x 100%”

b. Indikator kinerja ke 9 (sembilan) “Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKPN Tepat Waktu”.

A. Definisi Operasional Indikator

“Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK sesuai dengan kondisi yang ditetapkan dalam ketentuan”

B. Cara Perhitungan Capaian Indikator

“Jumlah PN/WL yang melapor tepat waktu / Jumlah total PN/WL dikali 100%”

c. Indikator kinerja ke 10 (sepuluh) “Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN Tepat Waktu”.

A. Definisi Operasional Indikator

“Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke KPK sesuai dengan kondisi yang ditetapkan dalam ketentuan”

B. Cara Perhitungan Capaian Indikator

“Jumlah PN/WL yang melapor tepat waktu / Jumlah total PN/WL dikali 100%”

d. Indikator kinerja ke 11 (sebelas) “Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Gratifikasi Tepat Waktu”.

A. Definisi Operasional Indikator

“Gambaran kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima”

B. Cara Perhitungan Capaian Indikator

“Jumlah pelaporan gratifikasi yang tepat waktu / jumlah pelaporan gratifikasi yang ada x 100%”

Sasaran	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019			Realisasi	Realisasi	Target Renstra 2019	Realisasi
				Target	Realisasi	% Capaian	2019 terhadap 2017 (%)	2019 terhadap 2018 (%)		2019 terhadap Target Renstra 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11)= (6)/(10)
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	88,7%	90%	92%	100%	108,70%	112,74%	111,11%	92%	108,70%
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	N/A	100	100%	100%	100%	N/A	100	100%	100%
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	70%	72,27%	85%	99,81%	117,42%	142,58	138,10%	85%	117,42%
	Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	N/A	66%	85%	84,09%	98,93%	N/A	127,4%	85%	98,93%

**Tabel 3. 7 Capaian Sasaran 4**

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

1. Indikator pertama ‘Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem Pengawasan’ dengan realisasi capaian pada tahun 2019 adalah 108,7% dengan kategori baik. Realisasi indikator tahun 2019 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 adalah 111,11% dan bila

dibandingkan dengan periode akhir Rencana Strategis tahun 2015-2019 adalah 108,7%.

Capaian indikator “Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem Pengawasan” Inspektorat II adalah 108,7% dengan kategori baik. Capaian Inspektorat I dan Inspektorat II sama-sama sebesar 108,7% dengan kategori baik. Tidak terdapat perbedaan capaian dikarenakan untuk indikator ini dikerjakan secara bersamaan antara tim inspektorat I dan Inspektorat II, selanjutnya akan terus dilakukan koordinasi antara Inspektorat I dan Inspektorat II bersama dengan Bagian TU Inspektorat Utama untuk terus mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator tersebut.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.22.05.19.1620 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi *Road Map* RB Badan POM Tahun 2019 terdapat 13 (tiga belas) rencana aksi kegiatan pada program penguatan sistem pengawasan sebagai berikut:

- a. Mempertahankan Opini WTP
- b. Peningkatan level Kapabilitas APIP Inspektorat.
- c. Sosialisasi WBS.
- d. Penyusunan Perka BPOM tentang Gratifikasi.
- e. Sosialisasi Gratifikasi.
- f. Pelaporan Gratifikasi.
- g. SE Gratifikasi.
- h. Sosialisasi Benturan Kepentingan.
- i. Pembangunan ZI WBK 15 Unit Kerja dan WBBM 9 Unit Kerja.
- j. Penyusunan Pedoman tentang pemantauan SPIP.
- k. Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE).
- l. Workshop SPIP.
- m. Evaluasi Pengendalian Utama

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator yaitu:

1. Pengembangan aplikasi:

- a. Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan WBS
  - b. Simolekdesi berkinerja (Sistem Monitoring secara Elektronik dan Dashboard Evaluasi Kinerja)
  - c. Solusi (Saluran Online Layanan Konsultasi)
  - d. Si Tampan Adi (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Intern dan Pustaka Audit)
2. Melakukan *Regulatory Impact Assesment* dengan tindak lanjut usulan perubahan kebijakan:
- 1) Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM.
  - 2) Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pencabutan atas Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Badan POM.
  - 3) Keputusan Kepala Badan POM No.HK.04.01.1.23.08.17.3896 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM, dan
  - 4) Keputusan Kepala Badan POM No.HK.1.23.11.15.5259 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penerapan SPIP di Lingkungan Badan POM.
  - 5) Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan POM Tahun 2020.
  - 6) Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.23.02.18.0879 Tahun 2018 tentang Penyampaian LHKPN dan LHKASN di lingkungan Badan POM.

- 7) Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Penilaian Maturitas SPIP Unit Kerja di Lingkungan Badan POM
  - 8) Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kepegawaian di Lingkungan Badan POM
2. Indikator sembilan 'Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu' dengan realisasi capaian pada tahun 2019 adalah 100,00% dengan kategori baik. Realisasi indikator tahun 2019 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 adalah 100,00% dan bila dibandingkan dengan periode akhir Rencana Strategis tahun 2015-2019 adalah 100,00%.
- A. Kunci keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKPN Tepat Waktu adalah:
- a. Komitmen Pimpinan yang kuat mengacu pada peraturan perundang-undangan.
  - b. Tingginya tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara/Wajib Laporan dalam menyampaikan LHKPN tepat waktu.
  - c. Pengelolaan data PN/WL LHKPN sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM No.HK.04.01.23.02.18.0879 tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan POM.
- B. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator tersebut adalah
- 1) Monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN secara intensif.
  - 2) Koordinasi dengan Instansi Pembina yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Indikator kinerja ke 10 (sepuluh) "Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN Tepat Waktu" dengan realisasi capaian pada tahun 2019 adalah 117,42% dengan kategori sangat baik. Realisasi indikator tahun 2019 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 adalah 138,10% dan bila dibandingkan dengan periode akhir Rencana Strategis tahun 2015-2019 adalah 117,42%.

- A. Kunci keberhasilan indikator kinerja Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN Tepat Waktu adalah:
- 1) Koordinasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan kepatuhan penyampaian LHKASN dilakukan secara optimal.
  - 2) Tingginya tingkat kesadaran dan kepatuhan ASN dalam menyampaikan LHKASN tepat waktu.
- B. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator tersebut adalah:
- 1) Monitoring kepatuhan penyampaian LHKASN secara intensif.
  - 2) Verifikasi kewajaran dan kesesuaian data PN/WL LHKASN.
  - 3) Koordinasi dengan instansi pembina yaitu Kementerian PAN dan RB.
4. Realisasi capaian indikator kinerja ke 11 (sebelas) "Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu" dengan realisasi capaian pada tahun 2019 adalah 98,93%. Realisasi indikator tahun 2019 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 adalah 127,4% dan bila dibandingkan dengan akhir periode Rencana Strategis tahun 2015-2019 adalah 98,93%.
- A. Target indikator ini tidak tercapai disebabkan:
- Kurangnya komitmen dan contoh dari pimpinan dalam pelaporan gratifikasi.
1. Belum seluruh pegawai mengetahui adanya tenggat waktu penyampaian laporan gratifikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. Kurangnya pemahaman penerima gratifikasi mengenai pedoman pengendalian gratifikasi yang wajib dilaporkan.
  3. Kurangnya kesadaran pegawai untuk menyampaikan laporan gratifikasi baik berupa penerimaan maupun penolakan.
  4. Aplikasi pelaporan gratifikasi secara online belum tersosialisasikan secara komprehensif untuk mempermudah pegawai dalam melakukan pelaporan gratifikasi.

- B. Dalam rangka meningkatkan realisasi capaian indikator kinerja Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Gratifikasi Tepat Waktu, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat II antara lain:
1. Sosialisasi pengendalian gratifikasi di Unit/Satuan Kerja di lingkungan Badan POM.
  2. Inspektorat Utama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan POM tiap triwulan.
  3. Surat Edaran No.HK.06.1.72.05.19.1688 tentang Larangan Menerima Gratifikasi pada hari raya keagamaan.
  4. Bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi dalam rangka mengembangkan aplikasi pelaporan gratifikasi pada kolom aplikasi publik pelaporan anti korupsi, kolusi dan nepotisme pada website Badan POM

Berdasarkan capaian kinerja pada indikator 8, 9, 10 dan 11 tersebut diatas, diketahui bahwa jika dibandingkan antara target dengan hasil capaian kinerja pada periode berakhirnya Renstra tahun 2019 rata-rata capaian indikator kinerja adalah 102,08% dengan kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran 4 “Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II” berhasil dicapai.

#### **5. Sasaran V “Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang Andal di Lingkup Wilayah Inspektorat II”.**

Sasaran strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- a. Indikator kinerja ke 12 (dua belas) “Tingkat Keandalan SPIP pada Mitra Kerja”.
  - 1) Definisi Operasional Indikator
 

“Suatu kondisi yang menggambarkan baiknya sistem pengendalian intern di unit kerja ditinjau dari lima unsur sistem pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, analisis risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan yang telah diverifikasi oleh APIP”

## 2) Cara Perhitungan Capaian Indikator

Nilai rata-rata PM-EPITE unit kerja yang telah diverifikasi oleh APIP

## b. Indikator kinerja ke 13 (tiga belas) Jumlah Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja.

## A. Definisi Operasional Indikator

“Laporan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik”

## B. Cara Perhitungan Capaian Indikator

Jumlah total laporan hasil pengawasan intern

Sasaran	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019			Realisasi	Realisasi	Target Renstra 2019	Realisasi
				Target	Realisasi	% Capaian	2019 terhadap 2017 (%)	2019 terhadap 2018 (%)		2019 terhadap Target Renstra 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11)= (6)/(10)
Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	95,46	92	85	79	92,94%	82,75%	85,86%	85	92,94%
	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	19	21	23	23	100%	121%	109,52%	23	100%

**Tabel 3. 8 Capaian Sasaran 5**

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

1. Realisasi capaian indikator kinerja ke 12 (dua belas) “tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja” dengan realisasi capaian pada tahun 2019 adalah 92,94% dengan kategori baik. Realisasi indikator tahun 2019 bila

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 adalah 85,86% dan bila dibandingkan dengan periode akhir Rencana Strategis tahun 2015-2019 adalah 92,94%.

Pada tahun 2019 target indikator ini tidak tercapai dan lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, hal ini disebabkan karena kelemahan pada unsur:

- 1) Pengendalian dan gaya operasi,
- 2) Komitmen terhadap kompetensi,
- 3) Kebijakan dan regulasi SDM.
- 4) Pengawasan melekat,

Capaian indikator “tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja” Inspektorat II adalah 98,87% dengan kategori baik. Bila dibandingkan dengan capaian Inspektorat I sebesar 91,51% dengan kategori baik. Capaian indikator Inspektorat II lebih baik dibandingkan dengan capaian indikator Inspektorat I disebabkan karena berdasarkan verifikasi penilaian PM-EPITE yang dilakukan oleh masing-masing unit masih terdapat GAP yang cukup banyak dengan hasil verifikasi Inspektorat II. Hal ini disebabkan karena pemahaman unit kerja terhadap proses identifikasi resiko, penetapan eksisting kontrol, mitigasi resiko dan monitoring resiko masih belum maksimal. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan fasilitasi audit kepatuhan ataupun audit operasional.

Upaya yang telah dilakukan Inspektorat II untuk mencapai indikator Tingkat Keandalan SPIP pada Mitra Kerja adalah:

1. Pengawasan penerapan manajemen risiko sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.23.08.17.3896 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.
2. Pemantauan terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern Unit Kerja melalui evaluasi manajemen risiko dan PM-EPITE.
3. Pemantapan SDM yang profesional, penguatan kelembagaan serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

4. Pada tahun 2019 Inspektorat II memfasilitasi pelaksanaan *piloting* Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) oleh BPKP untuk penerapan audit berbasis risiko.
- B. Realisasi capaian indikator kinerja ke 13 (tiga belas) “Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja” adalah 23 (dua puluh tiga) laporan dengan capaian 100% dengan kategori Baik. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 adalah 109,52% dan bila dibandingkan dengan periode akhir Rencana Strategis tahun 2015-2019 adalah 100%. Adapun rincian realisasi capaian indikator kinerja ke 13 sebagai berikut:
- a. Laporan hasil audit operasional/kinerja/kepegawaian/tujuan tertentu sebanyak 17 laporan.
  - b. Laporan hasil rewiu RKAKL/LK sebanyak 1 laporan.
  - c. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut pengawasan intern sebanyak 1 laporan.
  - d. Laporan hasil evaluasi AKIP sebanyak 1 laporan.
  - e. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Badan POM sebanyak 1 laporan.
  - f. Laporan hasil pelaksanaan audit internal sistem manajemen mutu/*Quality Management System* ISO 9001:2015 (QMS) sebanyak 1 laporan.
  - g. Laporan hasil pelaksanaan operasional pengawasan intern (evaluasi kegiatan dan administrasi keuangan) sebanyak 1 laporan.

Berdasarkan capaian kinerja pada indikator 12 dan 13 tersebut diatas, diketahui bahwa jika dibandingkan antara target dengan hasil capaian kinerja pada periode berakhirnya Renstra tahun 2019 rata-rata capaian indikator kinerja adalah 96,47% dengan kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran 5 “Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II” berhasil dicapai.

Capaian indikator “Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja” Inspektorat II adalah 100% dengan kategori baik. Bila dibandingkan dengan capaian Inspektorat I sebesar 100% dengan kategori baik. Capaian indikator

Inspektorat II dan Inspektorat I sama-sama memenuhi capaian 100%. Tidak terdapat perbedaan capaian jumlah laporan pengawasan intern antara Inspektorat I dan Inspektorat II dikarenakan penetapan target pengawasan sudah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Selain itu, indikator tersebut merupakan tupoksi utama dari Inspektorat II

#### 6. Sasaran VI “Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM yang sesuai SAP di Lingkup Wilayah Inspektorat II’.

Sasaran strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

a. Indikator kinerja ke 14 (empat belas) “Persentase Laporan Keuangan Satker yang Bebas Dari Kesalahan Material”.

1) Definisi Operasioanl Indikator

“Laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”

2) Cara Perhitungan Capaian Indikator

Jumlah satker/unit kerja yang bebas dari kesalahan material dibagi jumlah satker/unit kerja yang di audit dikali 100%

b. Indikator kinerja ke 15 (lima belas) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern.

A. Definisi Operasional Indikator

“Saran yang diberikan kepada auditan sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi dengan menghilangkan penyebab / mengurangi akibat terjadinya suatu permasalahan”

B. Cara Perhitungan Capaian Indikator

(Jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti / Jumlah total rekomendasi pengawasan intern) x 100%

Sasaran	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019			Realisasi 2019 terhadap 2017 (%)	Realisasi 2019 terhadap 2018 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Renstra 2019
				Target	Realisasi	% Capaian				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(%) (11)= (6)/(10)
Terjaminnya laporan keuangan B POM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	73,96%	81,1%	85%	86%	101,17%	116,27%	106,04%	85%	101,17%

Tabel 3. 9 Capaian Sasaran 6

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

1. Realisasi capaian indikator kinerja ke 14 (empat belas) “Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material” adalah 100,00% dengan kategori baik. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 adalah 100,00% dan bila dibandingkan dengan periode akhir Rencana Strategis tahun 2015-2019 adalah 100,00%.

Capaian indikator “Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material” Inspektorat II adalah 100% dengan kategori baik. Bila dibandingkan dengan capaian Inspektorat I sebesar 100% dengan kategori baik. Capaian indikator Inspektorat II dan Inspektorat I sama-sama memenuhi capaian 100%. Tidak terdapat perbedaan capaian jumlah laporan pengawasan intern antara Inspektorat I dan Inspektorat II dikarenakan pengawasan dan pengawalan terhadap seluruh unit pada masing-masing wilayah Inspektorat I dan II sudah dilakukan melalui mekanisme audit, reviu RKAKL dan Reviu Laporan Keuangan serta monitoring tindak lanjut. Selain itu Inspektorat I dan Inspektorat II juga melakukan pendampingan kepada unit sebelum dilaksanakannya pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI.

- A. Kunci keberhasilan pencapaian target indikator Persentase Laporan Keuangan Satker yang Bebas dari Kesalahan Material adalah:

1. Teknik revidu yang dilakukan oleh Inspektorat II baik untuk revidu Laporan Keuangan, Revidu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) dan Revidu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu kepada pedoman revidu yang terkini.
  2. Peningkatan peran Inspektorat II sebagai *trusted advisor* melalui layanan konsultasi.
  3. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan BPKP, terutama dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan dan pelaksanaan revidu Laporan Keuangan sehingga Laporan Keuangan Badan POM sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Realisasi capaian indikator kinerja ke 15 (lima belas) “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern” adalah 101,18% dengan kategori baik. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 adalah 106,04% dan bila dibandingkan dengan periode akhir Rencana Strategis tahun 2015-2019 adalah 101,17%.

Capaian indikator “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern” Inspektorat II adalah 101,18% dengan kategori baik. Bila dibandingkan dengan capaian Inspektorat I sebesar 106,28% dengan kategori baik. Capaian indikator Inspektorat I lebih baik dibandingkan dengan capaian indikator Inspektorat II disebabkan karena berdasarkan data monitoring dan tindak lanjut hasil audit, Inspektorat II telah melakukan audit kinerja, sedangkan Inspektorat I belum melaksanakan audit kinerja, dari hasil monitoring tindak lanjut atas hasil audit kinerja Inspektorat II diketahui bahwa tindak lanjut Unit atau Balai Besar /Balai POM atas rekomendasi audit kinerja masih rendah. Hal itu disebabkan karena beberapa tindak lanjut atas rekomendasi tersebut tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh Unit atau Balai Besar /Balai POM karena beberapa harus menunggu tindak lanjut perubahan kebijakan yang harus dilakukan oleh Badan POM Pusat.

A. Kunci keberhasilan capaian indikator ini adalah:

1. Meningkatnya peran Inspektorat II dalam fungsi pengawasan secara luas.
2. Pemanfaatan TI dalam pelaksanaan pemantauan.

3. Pemantauan/evaluasi TL atas laporan hasil audit Inspektorat II dilaksanakan tiap triwulan dengan tujuan untuk mengevaluasi progress tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan kerja/unit pelaksana.

B. Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indikator ini yaitu:

1. Hambatan internal

- a) Meningkatnya peran Inspektorat II dalam fungsi pengawasan secara luas, namun belum didukung jumlah sumber daya manusia yang memadai.
- b) Sistem monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengawasan berbasis aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan oleh Inspektorat Utama (SIMOLEKDESI) belum sepenuhnya dapat digunakan secara maksimal dikarenakan beberapa fitur yang masih kurang memadai sehingga masih dibutuhkan beberapa pengembangan dan perbaikan pada sistem.
- c) Pada aspek tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan internal masih terdapat ketidaksesuaian saran tindak lanjut yang diberikan oleh auditor dengan kondisi yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan.
- d) Tindak lanjut rekomendasi atas hasil temuan Audit Kinerja pada Balai Besar/Balai POM menunggu proses perubahan/revisi kebijakan pada tingkat pusat.

2. Hambatan eksternal

- a) Tindak lanjut hasil pengawasan unit kerja yang melibatkan pihak ke III (tiga) banyak mengalami kendala terutama dalam hal penyeteroran denda keterlambatan dan kelebihan pembayaran;
- b) Belum optimalnya upaya tindak lanjut yang dilakukan dan diupayakan oleh unit kerja terkait temuan penyeteroran denda keterlambatan dan kelebihan pembayaran;
- c) Satuan Kerja/Unit terkait kurang memahami rekomendasi sehingga tindak lanjut kurang memberikan perbaikan yang berarti;

- d) Unit kerja tidak segera berkoordinasi dengan unit terkait untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sehingga rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti.

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Membangun perencanaan audit pengawasan berbasis risiko, dan memaksimalkan proses penilaian manajemen resiko pada masing-masing unit kerja.
2. Memperkuat pengelolaan data hasil pengawasan sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi manajemen melalui pengembangan aplikasi SIMOLEKDESI.
3. Mengintensifkan koordinasi dengan Satuan Kerja/ Unit terkait dalam pemantauan tindak lanjut temuan Inspektorat II sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS).
4. Melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkala terhadap system monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengawasan yang telah dibuat dan dimanfaatkan.
5. Melaksanakan *sharing knowledge* antar auditor dan pembahasan dengan jajaran pimpinan (*ekspose*) untuk mengantisipasi dan meminimalkan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Berdasarkan capaian kinerja pada indikator 14 dan 15 tersebut diatas, diketahui bahwa jika dibandingkan antara target dengan hasil capaian kinerja pada periode berakhirnya Renstra tahun 2019 rata-rata capaian indikator kinerja adalah 100,58% dengan kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran 6 “Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II” berhasil dicapai.

## **7. Sasaran VII “Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019”.**

Sasaran startegis ini diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu indicator kinerja ke 16 (enam belas) “Nilai AKIP”.

- 1) Definisi Operasional Indikator

“Nilai yang digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansi secara berkelanjutan”

## 2) Cara Perhitungan Capaian Indikator

Nilai AKIP merupakan jumlah nilai total dari komponen :

1. Perencanaan kinerja dengan bobot 30%
2. Pengukuran kinerja dengan bobot 25%
3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%
4. Evaluasi internal dengan bobot 10%
5. Capaian kinerja dengan bobot 20%

Sasaran	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019			Realisasi 2019 terhadap 2017 (%)	Realisasi 2019 terhadap 2018 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Renstra 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11)= (6)/(10)
Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	74,73	75,31	81	78,38	96,77%	104,88%	104,07%	81	96,77%

**Tabel 3. 10 Capaian Sasaran 7**

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

Realisasi capaian indikator kinerja ke 16 (enam belas) “Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019” dengan realisasi capaian pada tahun 2019 adalah 96,77% dengan kategori baik. Realisasi indikator tahun 2019 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 adalah 104,07% dan bila dibandingkan dengan periode akhir Rencana Strategis tahun 2015-2019 adalah 96,77%.

Capaian indikator “Nilai AKIP” Inspektorat II adalah 96,77% dengan kategori baik. Bila dibandingkan dengan capaian Inspektorat I sebesar 96,47% dengan

kategori baik. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada capaian indikator tersebut hal ini disebabkan karena proses penyusunan Lakip dan sistem akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan secara bersama oleh Inspektorat I dan Inspektorat II yang dikoordinasikan oleh Bagian TU Inspektorat Utama. Pengembangan sistem dan aplikasi juga dilaksanakan secara bersama, selain itu monitoring atas capaian kinerja juga diakomodir oleh Bagian TU Inspektorat Utama.

- 1) Realisasi capaian indikator kinerja Nilai AKIP tidak mencapai target yang ditetapkan karena:
  - a. Rencana Aksi atas kinerja sudah ada dan telah terdapat target kinerja secara periodik, namun belum mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja
  - b. Belum memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang *up to date*.
  - c. Pelaksanaan sistem namun evaluasi internal yang dilakukan masih belum memberikan hasil yang maksimal untuk mendorong penyempurnaan akuntabilitas kinerja.
  - d. Capaian secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan, namun masih terdapat indikator yang capaiannya masih dibawah target yang telah ditetapkan.
- 2) Dalam rangka meningkatkan realisasi capaian indikator kinerja Nilai AKIP, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat II adalah:
  - a. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan mampu telusur hingga tataran individu pegawai.
  - b. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.

- c. Menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata dan memanfaatkannya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- d. Melaksanakan monitoring capaian dan kinerja sampai dengan level individu dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward dan punishment* terutama untuk level eselon IV keatas.

Berdasarkan capaian kinerja pada indikator 16 tersebut diatas, diketahui bahwa jika dibandingkan antara target dengan hasil capaian kinerja pada periode berakhirnya Renstra tahun 2019 rata-rata capaian indikator kinerja adalah 96,77% dengan kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran 7 “Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019” berhasil dicapai.

#### 8. Sasaran VIII “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern”.

Sasaran strategis ini diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu indikator ke 17 (tujuh belas) “Level Kapabilitas APIP”.

##### 1) Definisi Operasional Indikator

“Kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP”

##### 2) Cara Perhitungan Capaian Indikator

Mengidentifikasi pemenuhan indikator untuk seluruh pernyataan yang ada yaitu 240 pernyataan

Sasaran	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019			Realisasi 2019 terhadap 2017 (%)	Realisasi 2019 terhadap 2018 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Renstra 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11)= (6)/(10)

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%	Level 3	100%
--	------------------------	---------	---------	---------	---------	------	------	------	---------	------

**Tabel 3. 11 Capaian Sasaran 8**

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

Realisasi capaian indikator kinerja ke 17 (tujuh belas) “Level Kapabilitas APIP” dengan realisasi capaian pada tahun 2019 adalah 100,00% dengan kategori baik. Realisasi indikator tahun 2019 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 adalah 100,00% dan bila dibandingkan dengan periode berakhirnya Renstra tahun 2019 adalah 100.00%.

Sejak tahun 2017 Kapabilitas APIP Badan POM berada pada level 3 dengan catatan dan pada tahun 2018 Badan POM telah berhasil meraih Level 3 penuh kapabilitas APIP dari BPKP. Kunci keberhasilan pencapaian target indikator Level Kapabilitas APIP adalah:

- a. Dukungan dan komitmen dari pimpinan terhadap peran Inspektorat Utama sebagai APIP dan seluruh pegawai di Inspektorat untuk senantiasa mengembangkan diri dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan sesuai dengan tuntutan organisasi.
- b. Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun berdasarkan prioritas risiko dan kebutuhan manajemen serta stakeholder lainnya. PKPT telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Utama Badan POM Nomor B-PI.01.01.7.73.02.19.0150 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Badan POM tahun 2019.
- c. Melakukan pengawasan berdasarkan Standar Audit dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI).
- d. Terbentuknya Satuan Tugas Penjamin Mutu Hasil Pengawasan Internal.
- e. Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah memperhatikan risiko organisasi.
- f. Pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi sistem informasi monitoring secara elektronik dan dashboard evaluasi kinerja (SIMOLEKDESI), saluran online layanan untuk konsultasi (SOLUSI), aplikasi WBS, Gratifikasi dan aplikasi Benturan Kepentingan.

- g. SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas dalam menjalankan fungsi pengawasan internal.
- h. Diklat substansi teknis pengawasan seperti CRMO, CRMP, CIA, QIA.

**Tabel 3. 12 Level Kapabilitas APIP**

	<b>Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan</b>	<b>Inspektorat Utama BKKBN</b>	<b>Inspektorat Utama Badan POM</b>
<b>Perolehan IACM Level 3</b>	<b>2011</b>	<b>2019</b>	<b>2017</b>

Dari tabel diatas diketahui bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan memperoleh kapabilitas APIP level 3 lebih dahulu jika dibandingkan dengan Inspektorat Utama Badan POM, hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia maupun teknologi yang dimiliki oleh Inspektorat Utama Badan POM seperti belum terdapat panduan audit kinerja, layanan konsultasi, perencanaan berbasis risiko serta belum terlaksananya peran APIP sebagai *trusted advisor*. Beberapa kekurangan tersebut secara periodik telah diperbaiki dan ditindaklanjuti sehingga jika dibandingkan dengan Inspektorat Utama BKKBN raihan kapabilitas APIP Inspektorat Utama lebih cepat karena:

1. Inspektorat II selaku bagian dari Inspektorat Utama melakukan *benchmark* ke Inspektorat 7 kementerian Keuangan serta melakukan koordinasi kepada BPKP.
2. Dikembangkannya berbagai aplikasi pendukung untuk mendukung kegiatan pengawasan Inspektorat Utama antara lain aplikasi PM-EPITE, aplikasi Pelaporan Manajemen Resiko, aplikasi Pelaporan Gratifikasi, aplikasi Whistle blowing System (WBS), aplikasi Pelaporan Benturan Kepentingan, sistem pengawasan berbasis teknologi informasi sistem informasi monitoring secara elektronik dan dashboard evaluasi kinerja (SIMOLEKDESI), saluran online layanan untuk konsultasi (SOLUSI) secara online dengan basis data secara web base.

3. Pengembangan kompetensi auditor mengikuti diklat sertifikasi tingkat nasional-internasional seperti CRMO, CRMP, CIA, QIA, CFA, CFE, CCSA.
4. Penyusunan PKPT berbasis risiko.
5. Integrasi antara manajemen risiko dan ISO 9001:2015

Berdasarkan capaian kinerja pada indikator ke-17 tersebut diatas, diketahui bahwa jika dibandingkan antara target dengan hasil capaian kinerja pada periode berakhirnya Renstra tahun 2019 rata-rata capaian indikator kinerja adalah 100.00% dengan kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran 8 “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern” berhasil dicapai.

Keseluruhan realisasi serta capaian target masing - masing indikator sasaran dibandingkan dengan target Renstra 2015 - 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

### C. Realisasi Anggaran

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat II selama tahun 2019 telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat II secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat II Badan POM dengan KPPN setempat.

Penyerapan anggaran Inspektorat II tahun 2019 untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah sebesar 98.68% dari jumlah keseluruhan pagu (Rp. 6.690.890.000) dengan rincian sebagai berikut:

Target		Realisasi		Persentase (%)	
Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Kegiatan	Realisasi Anggaran
34	6.690.890.000	34	6.602.446.974	100%	98.68%

Tabel 3. 13 Capaian Anggaran 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>							
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11,5	11,15	96,96%	512.071.500	511.545.932	99.90%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%	100%	111,11%			
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	75%	100%	133,33%			
Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	81,07	98,87%	47.770.000	46.677.150	97.71%
Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	90,5	90,43	99,92%	810.273.500	795.551.722	98.18%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	75%	100%	133,33%			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	12	11	91,67%			
<b>Internal Process Control</b>							
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92%	100%	108,70%	591.407.000	584.497.030	98.83%
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	100%	100%	100%			
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	85%	99,81%	117,42%			
	Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	85%	84,09%	98,93%			
Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	85%	79%	92,94%	1.115.533.000	1.113.520.515	99.82%
	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23	23	100%	1.507.720.000	1479.844.604	98.15%
Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%	69.600.000	66.040.000	94.89%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%	86%	101,18%	538.941.000	526.942.030	97.77%
<b>Learning and Growth Perspective</b>							

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	81	78,38	96,77%	10.674.000	10.667.360	99.94%
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	1.486.900.000	1.467.400.331	99.70%

**6.690.890.000    6.602.391.674    98.68%**

Adapun uraian anggaran per sasaran kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pada sasaran pertama Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II terdapat kegiatan FGD Konsensus Lembar Kerja Evaluasi PMPRB dan Lokakarya FCP dengan pagu anggaran Rp. 512.071.500,- dan realisasi anggaran Rp. 511.545.932,-
- 2) Sasaran ke-2 (dua) meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 47.770.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 47.009.650,- terdapat pengembalian sebesar Rp. 332.500 sehingga realisasi netto Rp. 46.677.150,-
- 3) Sasaran ke-3 (tiga) meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN dengan pagu anggaran Rp. 810.273.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 803.187.922,- dan pengembalian sebesar Rp. 7.636.200 ,- sehingga realisasi netto Rp. 795.551.722,-
- 4) Sasaran ke-4 (empat) terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II dengan pagu anggaran sebesar Rp. 591.407.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 590.617.130,- terdapat pengembalian sebesar Rp. 6.120.100,- sehingga realisasi netto sebesar Rp. 584.497.030,-
- 5) Sasaran ke-5 (lima) tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 2.623.253.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.619.479.301,- terdapat pengembalian sebesar Rp. 26.114.182,- sehingga realisasi netto sebesar Rp. 2.593.365.119,-

- 6) Sasaran ke-6 (enam) terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II dengan pagu anggaran sebesar Rp. 608,541.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 601.214.030,- terdapat pengembalian sebesar Rp. 8.232.000,- sehingga realisasi netto sebesar Rp. 592.982.030,-
- 7) Sasaran ke-7 (tujuh) terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.674.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 10.674.000,-
- 8) Sasaran ke-8 (delapan) meningkatnya kapabilitas pengawasan intern dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.486.900.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.467.560.331,- terdapat pengembalian sebesar Rp. 160.000,-

#### D. Analisis Efisiensi Kegiatan

Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Berdasarkan perhitungan pengukuran efisiensi kegiatan Inspektorat, diperoleh informasi sebagai berikut:

Kategori Efisiensi	Jumlah Kegiatan
Ekstrem Efisien (TE > 0,5)	0
Efisien	26
Tidak Efisien	9

1. Sebanyak 26 (dua puluh enam) kegiatan yang telah terealisasi dinyatakan efisien.
2. Terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang tidak efisien yaitu:
  - a. FGD Konsensus Lembar Kerja Evaluasi PMPRB dan Lokakarya FCP
  - b. Implementasi IACM- Maturitas SPIP
  - c. Penilaian Resiko dan Pemantauan SPIP
  - d. Lokakarya SPIP dan Manajemen Risiko
  - e. Sosialisasi dan Intervensi Fraud Control Plan
  - f. Sosialisasi program Anti Korupsi

- g. Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan (Inspektorat II)
- h. Pertemuan Finalisasi Perencanaan Kinerja & Evaluasi Kinerja Tim Penilai Internal PMPZI WBK/WBBK
- i. Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan WBBM

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas tidak efisien karena rata-rata capaian anggaran yang digunakan lebih besar (*input*) dibandingkan dengan rata-rata capaian indikator kinerja (*output*).

Selain itu untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran, juga dilakukan perhitungan terhadap efisiensi per sasaran strategis sebagai berikut:

**Tabel 3. 14 Tingkat Efisiensi**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-Rata Capaian Target Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		Input (%)	Output (%)				
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem Pengawasan	99.99%	96.96%	0.97	1.00	-0.03	Tidak Efisien
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem Pengawasan	99.79%	111.11%	1.11	1.00	0.11	Efisien
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	99.77%	133.33%	1.34	1.00	0.34	Efisien
Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	97.71%	98.87%	1.01	1.00	0.01	Efisien
Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	99.99%	99.92%	1.00	1.00	0.00	Efisien
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	99.04%	133.33%	1.35	1.00	0.35	Efisien

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-Rata Capaian Target Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		Input (%)	Output (%)				
	Pengawasan Unit Kerja BPOM menuju predikat WBK/WBBM	95.70%	91.67%	0.96	1.00	-0.04	Tidak efisien
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	99.46%	108.70%	1.09	1.00	0.09	Efisien
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	99.75%	100.00%	1.00	1.00	0.00	Efisien
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	99.78%	117.42%	1.18	1.00	0.18	Efisien
	Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	97.52%	98.93%	1.01	1.00	0.01	Efisien
Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	99.82%	92.94%	0.93	1.00	-0.07	Tidak efisien
	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	98.29%	100.00%	1.02	1.00	0.02	Efisien
Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	94.89%	100.00%	1.05	1.00	0.05	Efisien
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	97.77%	101.18%	1.03	1.00	0.03	Efisien

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-Rata Capaian Target Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		Input (%)	Output (%)				
Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	99.94%	96.77%	0.97	1.00	-0.03	Tidak efisien
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	98.69%	100.00%	1.01	1.00	0.01	Efisien



# *BAB IV*

Penutup

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Tahun 2019 adalah tahun kelima dalam implementasi Rencana Strategis 2015-2019 Inspektorat. Pengawasan intern yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat II membutuhkan dukungan sistem, infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kapabilitas dan keahliannya.

Pada tahun 2019, terdapat beberapa keberhasilan besar Inspektorat II Badan POM, antara lain:

- a. Peningkatan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan menjadi 100%;
- b. Peningkatan persentase kepatuhan LHKPN di BPOM tepat waktu menjadi 100%;
- c. Peningkatan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM menjadi 89%;
- d. Peningkatan persentase keandalan SPIP pada mitra kerja;
- e. Peningkatan level kapabilitas APIP melalui skema Internal Audit Capability Model (IACM) menjadi level 3;
- f. Integrasi manajemen mutu ISO 9001:2015 dengan Manajemen Risiko.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa **secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja 2019 dan Perjanjian Kinerja 2019 dapat dicapai**. Adapun analisis capaian indikator kinerja 2015-2019 terhadap target rencana strategis 2015-2019 seperti terlampir pada **Lampiran 9**.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di awal, Inspektorat II telah melaksanakan program dalam rangka mencapai tujuan strategis, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Di samping itu, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparaturnya Badan POM.

Namun demikian, masih terdapat pencapaian 3 (tiga) sasaran yang belum optimal yaitu:

- 1) Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor.

Kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- a. Kurangnya ketepatan tim audit dalam memberikan solusi/pemecahan masalah.
- b. Adanya perbedaan persepsi antar auditor dalam membaca permasalahan dan memberikan rekomendasi.

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat II untuk mengatasi kendala pencapaian sasaran tersebut antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi teknis substantif maupun sertifikasi Auditor.
  - b. Melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri untuk meningkatkan kompetensi serta menyamakan persepsi.
  - c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penguatan koordinasi dan komunikasi antara Auditor dan *Auditee* salah satunya menggunakan aplikasi sistem informasi monitoring secara elektronik dan dashboard evaluasi kinerja (SIMOLEKDESI) yang digunakan untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil audit BPK dan Inspektorat II, evaluasi manajemen resiko dan evaluasi SAKIP.
  - d. Meningkatkan pelayanan dengan memberikan konsultasi melalui sistem teknologi informasi melalui aplikasi saluran online layanan untuk konsultasi (SOLUSI).
  - e. Pembahasan hasil audit melalui mekanisme ekspose hasil audit dengan Inspektur Utama BPOM.
- 2) Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II. Kendala dalam pencapaian sasaran ini disebabkan karena kelemahan pada unsur:
- a. Pengendalian dan gaya operasi,
  - b. Komitmen terhadap kompetensi,
  - c. Kebijakan dan regulasi SDM.
  - d. Pengawasan melekat,

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat II untuk mengatasi kendala pencapaian sasaran tersebut antara lain:

- a. Pengawasan penerapan manajemen risiko sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.23.08.17.3896 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

- b. Pemantauan terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern Unit Kerja melalui evaluasi manajemen risiko dan PM-EPITE.
  - c. Pemantapan SDM yang profesional, penguatan kelembagaan serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
  - d. Pada tahun 2019 Inspektorat II memfasilitasi pelaksanaan piloting Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) oleh BPKP untuk penerapan audit berbasis risiko.
- 3) Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019. Kendala dalam pencapaian sasaran ini disebabkan karena kelemahan pada unsur:
- a. Rencana Aksi atas kinerja sudah ada dan telah terdapat target kinerja secara periodik, namun belum mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja
  - b. Belum memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang up to date.
  - c. Pelaksanaan sistem namun evaluasi internal yang dilakukan masih belum memberikan hasil yang maksimal untuk mendorong penyempurnaan akuntabilitas kinerja.
  - d. Capaian secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan, namun masih terdapat indikator yang capaiannya masih dibawah target yang telah ditetapkan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat II untuk mengatasi kendala pencapaian sasaran tersebut antara lain:

- a. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan mampu telusur hingga tataran individu pegawai.
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan

pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.

- c. Menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata dan memanfaatkannya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- d. Melaksanakan monitoring capaian dan kinerja sampai dengan level individu dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward dan punishment terutama untuk level eselon IV keatas.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja 2019, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain adalah:

1. Langkah dalam rangka mempertahankan capaian
  - a. Melakukan kaji ulang dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Mutu (QMS) Inspektorat dengan berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan segala sumber daya yang tersedia melalui partisipasi seluruh personil yang terlibat untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.
  - b. Mengintensifkan upaya sosialisasi dan edukasi terkait dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh aparatur negara.
2. Langkah dalam rangka meningkatkan capaian
  - a. Mengintensifkan koordinasi dengan Satuan Kerja/ Unit terkait dalam pemantauan tindak lanjut temuan Inspektorat II sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS)
  - b. Melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkala terhadap system monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengawasan yang telah dibuat dan dimanfaatkan.

- c. Melaksanakan *sharing knowledge* antar auditor dan pembahsana dengan jajaran pimpinan (ekspose) untuk mengantisipasi dan meminimalkan perbedaan persepsi antar auditor dan meminimalisir perbedaan dalam pemberian rekomendasi agar seluruhnya dapat ditindaklanjuti.
- d. Secara terus menerus melaksanakan kampanye pelaporan pengaduan/*whistleblowing system*, gratifikasi, LHKPN dan LHKASN, Benturan Kepentingan secara *online* melalui media sosial Inspektorat II.
- e. Melaksanakan sosialisasi atas hasil pengembangan aplikasi yang telah dikembangkan secara *online* agar segera diketahui dan dimanfaatkan oleh masing-masing unit dan juga seluruh para pegawai Badan POM.
- f. Menjalinkan kerjasama yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan LKPP, BPKP, BPK RI, Kementerian Keuangan RI dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.
- g. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2019 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholder* dan menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.



# L A M P I R A N



## **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4246726; fax : 4245139  
Email : infopom@indo.net.id, tuinspektorat2bpom@gmail.com; Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN  
INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR B-HK.04.03.72.09.18.2919  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2015-2019**

**INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Inspektorat Utama perlu disusun Rencana Strategis Inspektorat II;  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a perlu ditetapkan Rencana Strategis Inspektorat II dengan Keputusan Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);  
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;  
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);  
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);  
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);  
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019.

### Pasal 1

Rencana Strategis Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Inspektorat II BPOM, mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 serta Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga 2015-2019.

### Pasal 2

- (1) Renstra Inspektorat II BPOM memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Nasional dan program prioritas Presiden.
- (2) Renstra Inspektorat II BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan.

### Pasal 3

- (1) Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Inspektorat II BPOM.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

### Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 7 September 2018  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Inspektur II



Dra. Zulainah, Apt, M.Si



## **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4246726; fax : 4245139  
Email : infopom@indo.net.id, tuinspektorat2bpom@gmail.com; Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR II  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR : B-HK.04.03.7.01.19.0290 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR II  
NOMOR B-HK.04.03.72.09.18.2920 TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2018-2019**

**INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik;  
b. bahwa terdapat arahan Inspektur Utama yg ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2019 dengan mempertimbangkan tidak adanya unit kerja yg berhasil meraih predikat WBK/WBBM tahun 2018 dari KemenPANRB;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : B-HK.04.03.7.01.19. Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur II Nomor B-HK.04.03.72.09.18.2920 Tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat II Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2018-2019.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4246726; fax : 4245139  
Email : infopom@indo.net.id, tuinspektorat2bpom@gmail.com; Website : www.pom.go.id

3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
9. Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : B-HK.04.03.7.03.18.35 Tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2019

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : B-HK.04.03.7.01.19. Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur II Nomor B-HK.04.03.72.09.18.2920 Tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat II Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2018-2019.
- Pertama : Indikator Kinerja II menjadi landasan dalam melaksanakan peran pengawasan internal yang



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4246726; fax : 4245139  
Email : infopom@indo.net.id, tuinspektorat2bpom@gmail.com; Website : www.pom.go.id

efektif dan efisien untuk masa tahun 2018-2019;

- Kedua : Indikator Utama sebagaimana dimaksud dictum kedua terdiri dari 1 (satu) lampiran, yaitu :
- Kedua : Indikator Kinerja II menjadi acuan untuk menetapkan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja (Lapkin) Satuan Kerja dan Unit Kerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2018-2019;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 24 Januari 2019  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Inspektur II

Dra. Zulaimah, Apt, M.Si



## Lampiran 3 - Perjanjian Kinerja 2019



# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4246726; fax : 4245139  
Email : infopom@indo.net.id, tuinspektorat2bpom@gmail.com; Website : www.pom.go.id

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Zulaimah, Apt., M.Si  
Jabatan : Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si  
Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2019

Pihak Kedua

(Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si.)

Pihak Pertama

(Dra. Zulaimah, Apt., M.Si.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
 UNIT KERJA INSPEKTORAT II**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11,5
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	75%
2	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	90,5
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	75%
		Pengawasan Unit Kerja BPOM menuju predikat WBK/WBBM	12
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92%
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	100%
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	85%
		Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	85%
5	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	85
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23
6	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%
7	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	81
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Level 3



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4246726; fax : 4245139  
Email : infopom@indo.net.id, tuinspektorat2bpom@gmail.com; Website : www.pom.go.id

Kegiatan  
Pengawasan dan Peningkatan  
Akuntabilitas Aparatur II

Anggaran  
Rp 6.690.890.000

Jakarta, 28 Januari 2019

Pihak Kedua

(Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si.)

Pihak Pertama

(Dra. Zulaimah, Apt., M.Si.)

## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	-	11,5	11,5	11,5				
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	-	90%	90%	90%				
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	75%	75%	75%	75%				
2	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	-	-	82	82				
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	-	90,5	90,5	90,5				
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	75%	75%	75%	75%				
		Pengawasan Unit Kerja BPOM menuju predikat WBK/WBBM	4	8	12	12				
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92%	92%	92%	92%				
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	100%	100%	100%	100%				
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	85%	85%	85%	85%				
		Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	85%	85%	85%	85%				
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	85	85	85	85				
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	4	12	18	23				



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4246726; fax : 4245139  
Email : infopom@indo.net.id, tuinspektora2bpom@gmail.com; Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN KEGATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
	Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	4	12	18	23				
6	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%	100%				
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%	85%	85%	85%				
7	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	81	81	81	81				
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3				

\*diukur pada akhir tahun

Jakarta, 28 Januari 2019

Pihak Kedua

(Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si.)

Pihak Pertama

(Dra. Zulaimah, Apt., M.Si)

## **Lampiran 4 - Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat II BPOM Tahun 2019**



# **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4246726; fax : 4245139  
Email : infopom@indo.net.id, tuinspektorat2bpom@gmail.com; Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN  
INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR B-HK.04.03.72.01.19.0294  
TENTANG  
RENCANA KINERJA TAHUNAN  
INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2019**

**INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan; dan  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);  
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;  
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);  
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);  
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);  
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4246726; fax : 4245139  
Email : infopom@indo.net.id, tuinspektorat2bpom@gmail.com; Website : www.pom.go.id

9. Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-HK.04.03.72.09.18.2919 tentang Rencana Strategis Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019.
- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 24 Januari 2019  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Inspektur II

Dra. Zulaimah, Apt, M.Si

## RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT II BADAN POM TAHUN 2019

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
<b>Customer Prespective</b>			
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	1.1. Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11,5
		1.2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%
		1.3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	75%
2	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai <i>Trusted Advisor</i>	2.1 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	3.1 Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	90,5
		3.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	75
		3.3 Pengawalan Unit Kerja BPOM menuju predikat WBK/WBBM	12
<b>Internal Proses Perspective</b>			
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	1.1. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92%
		1.2. Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	100%
		1.3. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	85%
		1.4. Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	85%
5	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	1.1. Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	85
		1.2. Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23
6	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	1.1. Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%
		1.2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%
<b>Learn &amp; Growth Perspective</b>			
7	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	7.1. Nilai AKIP	81
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	7.2. Level Kapabilitas APIP	level 3

Jakarta, 24 Januari 2019  
 Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 Inspektur II



Dra. Zulaimah, Apt.,M.Si

**Lampiran 5 - Nilai Perbandingan PMPRB Tahun 2018 dan 2019**

## Nilai Perbandingan PMPRB Tahun 2018 dan 2019

No	Penilaian	Bobot	Nilai Tahun 2019		Total	Keterangan	Nilai Tahun 2018
			Pusat	Unit			
	<b>PENGUATAN PENGAWASAN (12)</b>	12.00	6.18	4.97	11.15		11.38
1	Gratifikasi (1,5)	1.50	0.75	0.73	1.48	turun	1.50
2	Penerapan SPIP (1,5)	1.50	0.60	0.74	1.34	turun	1.50
3	Pengaduan Masyarakat (2)	2.00	1.00	0.98	1.98	turun	2.00
4	Whistle-Blowing System (1,5)	1.50	0.70	0.75	1.45	turun	1.50
5	Penanganan Benturan Kepentingan (1,5)	1.50	0.75	0.73	1.48	turun	1.50
6	Pembangunan Zona Integritas (2,5)	2.50	1.09	1.04	2.14	turun	2.25
7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5)	1.50	1.28		1.28	naik	1.13

**Lampiran 6 - Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2019**

**CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT II**

**TAHUN 2019**

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Pembilang		Penyebut		Target 2019	Capaian 2019	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
				Definisi	Realisasi	Definisi	Realisasi			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	(10)=(6)/(8)	(11) = (10)/(9)
<b>Stakeholder/Customer Perspective</b>										
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Badan POM sebelum dilakukan evaluasi penilaian pelaksanaan RB oleh Tim Evaluator Kemenpan RB	Hasil Nilai PMPRB BPOM pengungkit penguatan sistem pengawasan		Hasil Nilai PMPRB BPOM pengungkit penguatan sistem pengawasan		11.5	11.15	96.96%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti hasil evaluasi RB BPOM	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai saran	3	Jumlah total rekomendasi	3	90%	100%	111.11%

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Pembilang		Penyebut		Target 2019	Capaian 2019	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
				Definisi	Realisasi	Definisi	Realisasi			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	(10)=(6)/(8)	(11) = (10)/(9)
<b>Stakeholder/Customer Perspective</b>										
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	Hasil tindak lanjut rekomendasi	7	Jumlah rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	7	75%	100%	133.33%
	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Presentase Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	Rekapitulasi Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II		Rekapitulasi Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II		82	81.07	98.87%
	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	Nilai PMPRB didapat dari penjumlahan antara komponen pengungkit dan komponen hasil	Hasil Nilai PMPRB		Hasil Nilai PMPRB		90.5	90.43	99.92%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	Rekap Rekomendasi	12	Jumlah total rekomendasi	12	75%	100%	133.33%

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Pembilang		Penyebut		Target 2019	Capaian 2019	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
				Definisi	Realisasi	Definisi	Realisasi			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	(10)=(6)/(8)	(11) = (10)/(9)
<b>Stakeholder/Customer Perspective</b>										
		Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	Jumlah nilai bobot pada komponen pengungkit	Jumlah nilai bobot pada komponen pengungkit maksimal 60 % dan komponen hasil maksimal 40 %		Jumlah nilai bobot pada komponen pengungkit maksimal 60 % dan komponen hasil maksimal 40 %		WBK:12	WBK:11	91.67%
<b>Internal Process Perspective</b>										
	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Jumlah realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Jumlah realisasi rencana aksi	15	Jumlah rencana aksi	15	92%	100%	108.70%
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	Jumlah PN/WL wajib LHKPN yang melapor tepat waktu	Jumlah PN/WL yang melapor tepat waktu	1100	Jumlah total PN/WL	1100	100%	100%	100%
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	Jumlah PN/WL wajib LHKASN yang melapor tepat waktu	Jumlah PN/WL yang melapor tepat waktu	2064	Jumlah total PN/WL	2068	85%	100%	117.42%

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Pembilang		Penyebut		Target 2019	Capaian 2019	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
				Definisi	Realisasi	Definisi	Realisasi			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	(10)=(6)/(8)	(11) = (10)/(9)
<b>Stakeholder/Customer Perspective</b>										
		Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	Jumlah pelaporan gratifikasi yang tepat waktu	Jumlah pelaporan gratifikasi yang tepat waktu	37	jumlah pelaporan gratifikasi yang ada	44	85%	84%	98.93%
	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	Nilai rata-rata PM-EPITE unit kerja yang telah diverifikasi oleh APIP	Nilai rata-rata PM-EPITE terverifikasi		Nilai rata-rata PM-EPITE terverifikasi		85%	79%	92.94%
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	Presentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja	Laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23	Laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23	23	23	23
	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	Jumlah satker/unit kerja yang bebas dari kesalahan material	Jumlah satker/unit kerja yang bebas dari kesalahan material dibagi jumlah satker	21	jumlah satker/unit kerja yang di audit	21	100%	100%	100%
	Inspektorat II	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	Jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Total rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	1057	Jumlah total rekomendasi pengawasan intern	1229	85%	86%	101.18%

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Pembilang		Penyebut		Target 2019	Capaian 2019	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
				Definisi	Realisasi	Definisi	Realisasi			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	(10)=(6)/(8)	(11) = (10)/(9)
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>										
<i>Learning and Growth Perspective</i>										
	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	Hasil evaluasi dari sumber data yang diperoleh sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Evaluasi dari sumber data yang diperoleh sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		Evaluasi dari sumber data yang diperoleh sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		81	78.38	96.77%
	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP		Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	100%

**Lampiran 7 - Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Per Triwulan Inspektorat II**

**CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PER TRIWULAN INSPEKTORAT II**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Nilai Pencapaian Sasaran (%)			
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	(11) = (7)/(6)	(12) = (8)/(6)	(13) = (9)/(6)	(14) = (10)/(6)
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>													
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	--	11,5	11,5	11,5	TW2	11.15	11.15	11.15	TW2	96.96%	96.96%	96.96%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	--	90%	90%	90%	TW3	TW3	100%	100%	-	-	111.11%	111.11%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	75%	75%	75%	75%	100	57.14	85.71	100%	133.33%	76.19%	114.29%	133.33%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Nilai Pencapaian Sasaran (%)			
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	(11) = (7)/(6)	(12) = (8)/(6)	(13) = (9)/(6)	(14) = (10)/(6)
Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	--	--	82	82	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	81.07	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	98.87%
Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	--	90,5	90,5	90,5	TW2	90.43	90.43	90.43	--	99.92%	99.92%	99.92%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	75%	75%	75%	75%	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	100%	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	133.33%
	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	4	8	12	12	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	12	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	91.67%
<b>Internal Process Control</b>													
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92%	92%	92%	92%	TW3	TW3	100%	100%	TW3	TW3	108.70%	108.70%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Nilai Pencapaian Sasaran (%)			
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	(11) = (7)/(6)	(12) = (8)/(6)	(13) = (9)/(6)	(14) = (10)/(6)
Inspektorat II	Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	85%	85%	85%	85%	99.81%	99.81%	99.81%	99.81%	117.42%	117.42%	117.42%	117.42%
	Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	85%	85%	85%	85%	62.50%	78.00%	84.21%	84.09%	73.53%	91.50%	99.07%	98.93%
Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	85	85	85	85	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	79	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	92.94%
	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	4	12	18	23	5	13	16	23	21.74%	56.52%	69.57%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Nilai Pencapaian Sasaran (%)			
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	(11) = (7)/(6)	(12) = (8)/(6)	(13) = (9)/(6)	(14) = (10)/(6)
Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%	100%	23.81	61.9	76.19	100	23.81%	61.90%	76.19%	100%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%	85%	85%	85%	80.77	86.15	85.65	86	95.03%	101.36%	100.76%	101.18%
<b>Learning and Growth Perspective</b>													
Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	81	81	81	81	TW3	TW3	78.38	78.38	TW3	TW3	96.77%	96.77%
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%	100%

**Lampiran 8 - Pengukuran Kinerja Kegiatan Inspektorat II Tahun 2019**

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN INSPEKTORAT II TAHUN 2019**

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	PERSENTASE
								(%)
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II			512,071,500	522,550,932	11,105,000	511,545,932	99.90%
		Nilai PMPRB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan		276,131,500	287,116,450	11,105,000	276,111,450	99.99%
		FGD Konsensus Lembar Kerja Evaluasi PMPRB dan Lokakarya FCP	Input:	276,131,500	287,116,450	11,105,000	276,111,450	99.99%
			Dana (Rp)					
			Output:					
			Laporan hasil FGD konsensus lembar kerja evaluasi PMPRB dan Lokakarya FCP (Lap)					
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan		166,940,000	166,589,782	-	166,589,782	99.79%
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program RB BPOM	Input:	58,520,000	58,173,420		58,173,420	99.41%		
	Dana (Rp)							
	Output:							
	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program RB BPOM (Lap)							
Evaluasi Pelaksanaan RB oleh KemenPAN RB	Input:	108,420,000	108,416,362		108,416,362	100.00%		
	Dana (Rp)							
	Output:							
	Laporan evaluasi pelaksanaan RB oleh KemenPAN RB (Lap)							

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	PERSENTASE
								(%)
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penelusuran Pengaduan		69,000,000	68,844,700	-	68,844,700	99.77%
		Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan antar K/L	<u>Input:</u>	69,000,000	68,844,700		68,844,700	99.77%
			Dana (Rp)					
			<u>Output:</u>					
Laporan kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pengawasan dan antar K/L (Lap)								
2	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor			47,770,000	47,009,650	332,500	46,677,150	97.71%
		Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern		47,770,000	47,009,650	332,500	46,677,150	97.71%
		Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	<u>Input:</u>	47,770,000	47,009,650	332,500	46,677,150	97.71%
			Dana (Rp)					
<u>Output:</u>	Laporan evaluasi akuntabilitas kinerja (Lap)							
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN			810,273,500	842,091,146	46,639,424	795,551,722	98.18%
		Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online		276,131,500	287,116,450	11,105,000	276,111,450	99.99%
		FGD Konsensus Lembar Kerja Evaluasi PMPRB dan Lokakarya FCP	<u>Input:</u>	276,131,500	287,116,450	11,105,000	276,111,450	99.99%
			Dana (Rp)					
			<u>Output:</u>					
		Laporan FGD konsensus lembar kerja evaluasi PMPRB dan Lokakarya FCP (Lap)						
Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi RB BPOM		177,832,000	199,851,390	23,727,324	176,124,066	99.04%		
Pemantauan dan Evaluasi	<u>Input:</u>	177,832,000	199,851,390	23,727,324	176,124,066	99.04%		
	Dana (Rp)							

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	PERSENTASE	
								(%)	
		Program Penguatan Sistem Pengawasan dan Tindak Lanjutnya	<u>Output:</u>						
			Laporan pemantauan dan evaluasi program penguatan sistem pengawasn dan tindak lanjutnya (Lap)						
		Pengawasan Unit Kerja BPOM Menuju Predikat WBK/WBBM			356,310,000	355,123,306	11,807,100	343,316,206	96.35%
		Pertemuan Finalisasi Perencanaan Kinerja & Evaluasi Kinerja Tim Penilai Internal PMPZI WBK/WBBK	<u>Input:</u>	30,000,000	29,764,986			29,764,986	99.22%
Dana (Rp)									
	Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan WBBM	<u>Output:</u>	326,310,000	325,358,320	11,807,100	313,551,220	96.09%		
		Laporan hasil intervensi pemenuhan indikator WBK dan WBBM (Lap)							
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilyah			591,407,000	600,045,430	15,548,400	584,497,030	98.83%	
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Program Penguatasn Sistem Pengawasan		331,930,000	340,766,530	10,618,400	330,148,130	99.46%	
		Bimtek TIM Asessor dan Monev RB BPOM	<u>Input:</u>	144,130,000	151,196,000	7,090,000	144,106,000	99.98%	
Dana (Rp)									
		<u>Output:</u>							

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	PERSENTASE		
								(%)		
	Inspektorat II		Laporan Bimtek Tim asesor dan monev RB BPOM (Lap)							
		Bimbingan Teknis Inspektorat II	<u>Input:</u>		187,800,000	189,570,530	3,528,400	186,042,130	99.06%	
			Dana (Rp)							
			<u>Output:</u>	Laporan bimbingan teknis Inspektorat II (Lap)						
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu				32,000,000	31,920,000	-	31,920,000	99.75%
		Public Campaign BPOM	<u>Input:</u>		32,000,000	31,920,000		31,920,000	99.75%	
			Dana (Rp)							
			<u>Output:</u>	Laporan public campaign BPOM (Lap)						
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu				26,575,000	26,516,500	-	26,516,500	99.78%
		Kajian/ Pedoman/ Peraturan Inspektorat II	<u>Input:</u>		26,575,000	26,516,500		26,516,500	99.78%	
Dana (Rp)										
<u>Output:</u>	Laporan Kajian/pedoman/peraturan Inspektorat II (Lap)									
Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu				200,902,000	200,842,400	4,930,000	195,912,400	97.52%		
Rapat Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan	<u>Input:</u>		200,902,000	200,842,400	4,930,000	195,912,400	97.52%			
	Dana (Rp)									
	<u>Output:</u>	Notulen rapat pelaksanaan pelaporan LJKPN, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan								

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	PERSENTASE
								(%)
5	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II			2,623,253,000	2,767,783,901	174,418,782	2,593,365,119	98.86%
		Tingkat Keandalan SPIP Pada Mitra Kerja		1,115,533,000	1,221,452,015	107,931,500	1,113,520,515	99.82%
		Implementasi IACM-Maturitas SPIP	<u>Input:</u>	11,020,000	10,923,300		10,923,300	99.12%
			Dana (Rp)					
			<u>Output:</u>	24,122,000	23,910,360		23,910,360	99.12%
			Laporan implementasi IACM-Maturitas SPIP (Lap)					
		Penilaian Resiko dan Pemantauan SPIP	<u>Input:</u>	1,046,901,000	1,153,284,215	107,931,500	1,045,352,715	99.85%
			Dana (Rp)					
		Lokakarya SPIP dan Manajemen Risiko	<u>Output:</u>	21,350,000	21,195,940		21,195,940	99.28%
			Laporan lokakarya SPIP dan manajemen risiko (Lap)					
		Sosialisasi dan Intervensi <i>Fraud Control Plan</i>	<u>Input:</u>	12,140,000	12,138,200		12,138,200	99.99%
			Dana (Rp)					
Sosialisasi program Anti Korupsi	<u>Output:</u>							
	Laporan sosialisasi program Anti Korupsi (Lap)							

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	PERSENTASE
								(%)
		Jumlah Laporan Pengawasan Intern Pada Mitra Kerja		1,507,720,000	1,546,331,886	66,487,282	1,479,844,604	98.15%
		Audit	<u>Input:</u>	1,335,880,000	1,374,568,696	62,727,282	1,311,841,414	98.20%
			Dana (Rp)					
			<u>Output:</u>					
		Laporan audit (Lap)						
		Reviu	<u>Input:</u>	171,840,000	171,763,190	3,760,000	168,003,190	97.77%
			Dana (Rp)					
<u>Output:</u>								
Laporan reviu (Lap)								
6	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II			608,541,000	601,214,030	8,232,000	592,982,030	97.44%
		Persentase Laporan Keuangan Satker yang Bebas dari Kesalahan Material		69,600,000	66,040,000	-	66,040,000	94.89%
		Administrasi Keuangan	<u>Input:</u>	69,600,000	66,040,000		66,040,000	94.89%
			Dana (Rp)					
			<u>Output:</u>					
		Laporan administrasi keuangan (Lap)						
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern		538,941,000	535,174,030	8,232,000	526,942,030	97.77%
Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	<u>Input:</u>	538,941,000	535,174,030	8,232,000	526,942,030	97.77%		
	Dana (Rp)							
	<u>Output:</u>							
Laporan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan (Lap)								
7	Terwujudnya RB			10,674,000	10,667,360	-	10,667,360	99.94%
		Nilai AKIP		10,674,000	10,667,360	-	10,667,360	99.94%

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	PERSENTASE
								(%)
	Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan (Inspektorat II)	<u>Input:</u> Dana (Rp) <u>Output:</u> Laporan penyusunan laporan akuntabilitas, laporan tahunan, laporan pengawasan (Inspektorat II)	10,674,000	10,667,360		10,667,360	99.94%
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern			1,486,900,000	1,467,560,331	160,000	1,467,400,331	98.69%
		Level Kapabilitas APIP		1,486,900,000	1,467,560,331	160,000	1,467,400,331	98.69%
		Audit Internal/ Surveilan QMS/ RTM Inspektorat II	<u>Input:</u> Dana (Rp) <u>Output:</u> Laporan audit internal/surveilan/QMS/RTM Inspektorat II (Lap)	36,930,000	36,650,000		36,650,000	99.24%
			<u>Input:</u> Dana (Rp) <u>Output:</u> Kegiatan diklat <i>lead auditor internal</i> (Lap)	207,000,000	206,964,900	160,000	206,804,900	99.91%
		Pelatihan Sertifikasi Auditor	<u>Input:</u> Dana (Rp) <u>Output:</u> SDM yang mengikuti sertifikasi auditor (org)	136,200,000	136,180,000		136,180,000	99.99%
			Pelatihan /	<u>Input:</u>				291,655,000

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	PERSENTASE
								(%)
		Workshop/ Meeting Auditor	Dana (Rp)	292,900,000	291,655,000			
			<u>Output:</u>					
			Kegiatan pelatihan/workshop/meeting auditor					
		Workshop Internal Auditor (SNIA)	<u>Input:</u>	66,480,000	66,368,331		66,368,331	99.83%
			Dana (Rp)					
			<u>Output:</u> Laporan workshop internal auditor (SNIA) (Lap)					
		Pelatihan/ Workshop Pegawai TU	<u>Input:</u>	111,450,000	110,375,000		110,375,000	99.04%
			Dana (Rp)					
			<u>Output:</u> SDM yang mengikuti sertifikasi TU (org)					
		Pelatihan Kantor Sendiri	<u>Input:</u>	6,120,000	6,036,600		6,036,600	98.64%
			Dana (Rp)					
			<u>Output:</u> Notulen pelatihan kantor sendiri					
		Peningkatan Kompetensi CPNS JFU	<u>Input:</u>	90,000,000	89,945,000		89,945,000	99.94%
			Dana (Rp)					
			<u>Output:</u> SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi CPNS JFU					
		Rapat Evaluasi Tingkat Ittama	<u>Input:</u>	192,049,000	191,053,900		191,053,900	99.48%
			Dana (Rp)					
			<u>Output:</u>					

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	PERSENTASE
								(%)
			Notulen rapat evaluasi tingkat itama					
		Workshop Diagnostic Assesment FCP	<u>Input:</u>	36,800,000	36,450,000		36,450,000	99.05%
			Dana (Rp)					
		Pertemuan finalisasi perencanaan kinerja Inspektorat Utama 2020 sd 2024	<u>Output:</u>	310,971,000	295,881,600		295,881,600	95.15%
			Laporan workshop diagnostic assessment FCP					
			Laporan pertemuan finalisasi perencanaan kinerja inspektorat utama					

**Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp. 6.690.890.000,-**

**Realisasi Anggaran : Rp. 6.602.391.674,-**

**Lampiran 9 - Perbandingan Realisasi Tahun 2015 - 2019 terhadap Target Renstra 2019**

**Perbandingan Realisasi Tahun 2015 s.d. 2019 terhadap Target Renstra 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	2015		2016		2017		2018		2019	
				Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (7)/(4)	(9)	(10) = (9)/(4)	(11)	(12) = (11)/(4)	(13)	(14) = (13)/(4)
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	1. Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem Pengawasan	11,5	N/A	N/A	N/A	N/A	11,05	96,08	11,38	98,95	11,15	96,96
		2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem Pengawasan	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	111,11	100%	111,11	100%	111,11
		3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	75%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50%	66,66	100%	133,33
2	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	4. Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	N/A	N/A	N/A	N/A	84,31	102,81	81,35	99,20	81,07	98,87
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	5. Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	90,5	N/A	N/A	N/A	N/A	88,7	98,01	89,55	98,95	90,43	99,92
		6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	75%	N/A	N/A	N/A	N/A	87,5%	116,66	89%	118,66	100%	133,33
		7. Pengawasan Unit Kerja BPOM menuju predikat WBK/WBBM	12	N/A	N/A	N/A	N/A	WBK:4 WBBM:0	33,33	WBK:13 WBBM:3	116,66	WBK/ WBBM: 11	91,67

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	2015		2016		2017		2018		2019	
				Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (7)/(4)	(9)	(10) = (9)/(4)	(11)	(12) = (11)/(4)	(13)	(14) = (13)/(4)
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	8. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92%	N/A	N/A	N/A	N/A	88,7%	96,41	90%	97,82	100%	108,70
		9. Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%	100
		10. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	82,35	72,27%	85,02	99,81%	117,42
		11. Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	66%	77,64	84,09%	98,93
5	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	12. Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	95,46	112,30	92	108,23	79	92,94
		13. Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23	N/A	N/A	N/A	N/A	19	82,60	21	91,30	23	100
6	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	14. Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100	100%	100	100%	100
		15. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	73,96%	87,01	81,1%	95,41	86%	101,17
7	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai	16. Nilai AKIP	81	N/A	N/A	N/A	N/A	74,73	92,25	75,31	92,97	78,38	96,77

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	2015		2016		2017		2018		2019	
				Realisasi	% realisasi i thdp target 2019	Realisasi	% realisasi i thdp target 2019	Realisasi	% realisasi i thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (7)/(4)	(9)	(10) = (9)/(4)	(11)	(12) = (11)/(4)	(13)	(14) = (13)/(4)
	Roadmap RB BPOM 2015-2019												
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	17. Level Kapabilitas APIP intern	Level 3	N/A	N/A	N/A	N/A	Level 3	100	Level 3	100	Level 3	100

### Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja yang sudah tidak relevan dengan Revisi Renstra Inspektorat II Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	2015		2016		2017		2018		2019	
				Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (7)/(4)	(9)	(10) = (9)/(4)				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja	81	N/A	N/A	69,94	86,35	70,78	87,38	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Roadmap RB	80%	69,12%	86,40	69,68%	87,10	88,70%	110,88	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	80%	68,36%	85,45	72,04%	90,05	84,31%	105,39	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan	11	10,67	97,00	10,46	95,09	11,05	100,45	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	90%	85,37%	94,86	106,45%	118,28	100%	111,11	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"	94,50%	90,40%	95,66	100%	105,82	95%	100,53	N/A	N/A	N/A	N/A

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	2015		2016		2017		2018		2019	
				Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (7)/(4)	(9)	(10) = (9)/(4)				
4	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	100%	2%	2	44,09%	44,09	97,98%	97,98	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%	100%	100	100%	100	100%	100	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34	29	85,29	34	100	34	100	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Implementasi QMS	Perolehan sertifikasi ISO 9001	Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO	100	Sertifikasi ISO	100	Sertifikasi ISO	100	N/A	N/A	N/A	N/A

**Lampiran 10 - Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Mitra Inspektorat II 2019**

**REKAPITULASI HASIL SURVEY KEPUASAN MITRA INSPEKTORAT II  
2019**

Dimensi Quality Service	Responden		Kepuasan	Harapan
	Tahun 2018	Tahun 2019		
Wujud Fisik (Tangible)	10	854	79.55	87.51
Keandalan (Reability)			81.65	89.60
Kesigapan (Responsiveness)			80.68	89.38
Jaminan (Assurance)			81.56	89.35
Empati (Empathy)			81.92	90.11
Indeks			81.07	89.19

**Lampiran 11 - Hasil Penilaian PM-EPITE Tahun 2019****HASIL PENILAIAN PM-EPITE TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>Nilai</b>
1	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	83
2	Biro Perencanaan dan Keuangan	84
4	Biro Kerja Sama	78
5	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan	85
6	Biro Hukum dan Organisasi	81
8	Inspektorat I	81
10	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	77
11	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	88
12	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	75
13	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	83
14	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	80
16	Direktorat Pengamanan	85
17	Direktorat Intelijen	85
18	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	82
19	Pusat Data dan Informasi	82
20	Balai Besar POM di Manado	81
21	Balai Besar POM di Medan	75
22	Balai Besar POM di Padang	83
23	Balai Besar POM di Semarang	85
24	Balai Besar POM di Yogyakarta	85
25	Balai Besar POM di Denpasar	83
26	Balai Besar POM di Pontianak	76
27	Balai Besar POM di Jayapura	77
28	Balai POM di Serang	81
29	Balai POM di Gorontalo	75
30	Balai POM di Ambon	81
31	Balai POM di Kendari	73
32	Balai POM di Mamuju	72
33	Balai POM di Batam	79
34	Balai POM di Bengkulu	79
35	Balai POM di Pangkalpinang	79
36	Balai POM di Sofifi	75
<b>Nilai Rata-Rata</b>		<b>80,25</b>

**Lampiran 12 - Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2019****HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>Nilai</b>
1	Sekretariat Utama	78,35
2	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	70,36
3	Biro Perencanaan dan Keuangan	77,35
4	Biro Kerja Sama	72,38
5	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan	74,63
6	Biro Hukum dan Organisasi	73,44
7	Inspektorat Utama	77,38
8	Inspektorat I	78,14
9	Deputi Pengawasan Pangan Olahan	77,72
10	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	76,25
11	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	76,37
12	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	72,41
13	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	75,86
14	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	70,68
15	Deputi Penindakan	76,83
16	Direktorat Pengamanan	73,53
17	Direktorat Intelijen	73,08
18	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	74,07
19	Pusat Data dan Informasi	74,04
20	Balai Besar POM di Manado	74,60
21	Balai Besar POM di Medan	69,78
22	Balai Besar POM di Padang	76,55
23	Balai Besar POM di Semarang	76,14
24	Balai Besar POM di Yogyakarta	78,03
25	Balai Besar POM di Denpasar	74,75
26	Balai Besar POM di Pontianak	72,32
27	Balai Besar POM di Jayapura	74,44
28	Balai POM di Serang	75,88
29	Balai POM di Gorontalo	72,18
30	Balai POM di Ambon	74,07
31	Balai POM di Kendari	74,32
32	Balai POM di Mamuju	70,12
33	Balai POM di Batam	71,87
34	Balai POM di Bengkulu	72,24
35	Balai POM di Pangkalpinang	72,22
36	Balai POM di Sofifi	65,93
<b>Nilai Rata-Rata</b>		<b>74,12</b>

**Lampiran 13 - Monitoring Status Temuan Audit Inspektorat Badan POM Tahun Audit s.d Tahun 2019 Per 31 Desember 2019**

**Monitoring Status Temuan Audit Inspektorat Badan POM**

**Tahun Audit s.d. Tahun 2019 Per 31 Des 2019**

NO	Nama Unit Kerja	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai Setor (Rp)	Telah Setor (Rp)	Kurang (Lebih) Setor (Rp)
1	BPOM di Medan	2014	5	15	15	0	0	34.195.041	34.195.041	-
		2015	3	7	7	0	0	6.310.000	6.310.000	-
		2016	6	12	9	3	0	1.981.111	1.981.111	-
		2017	4	4	0	2	2	-	-	-
		2018	7	23	1	0	22	280.714.378	30.267.600	250.446.778
		2019	8	33	0	0	33	3.310.000	-	-
2	BPOM di Padang	2013	9	20	20	0	0	42.154.470	42.154.470	-
		2014	8	27	26	1	0	105.972.916	84.216.390	21.756.526
		2015	6	10	10	0	0	13.794.750	13.794.750	-
		2016	5	14	14	0	0	12.848.543	12.848.543	-
		2017	2	4	4	0	0	-	-	-
		2018	3	26	26	0	0	40.825.611	40.825.611	-
		2019	7	38	28	10	6.755.452	7.015.695	(260.243)	
3	BPOM di Bengkulu	2013	8	15	15	0	0	1.788.723	1.788.723	-
		2015	4	15	15	0	0	17.870.767	17.870.767	-
		2016	5	14	14	0	0	3.885.500	3.885.500	-
		2017	3	7	7	0	0	23.544.990	23.544.990	-
		2018	5	19	13	6	0	3.000.000	3.000.000	-
4	BPOM di Batam	2014	1	16	16	0	0	30.103.030	30.103.030	-
		2015	5	12	12	0	0	4.630.000	4.630.000	-

NO	Nama Unit Kerja	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai Setor (Rp)	Telah Setor (Rp)	Kurang (Lebih) Setor (Rp)
		2016	6	22	22	0	0	203.380	203.380	-
		2018	4	10	9	1	0	-	-	-
5	BPOM di Pangkalpinang	2013	8	17	17	0	0	27.066.900	27.066.900	-
		2014	7	19	19	0	0	54.094.566	54.094.566	-
		2016	7	13	13	0	0	6.085.000	6.115.000	-
		2017	7	13	13	0	0	-	-	-
		2018	5	11	10	1	0	-	-	-
		2019	10	37	0	0	37	21.510.170	-	-
6	BPOM di Serang	2015	3	10	10	0	0	22.858.098	22.858.098	-
		2018	5	15	12	3	0	-	-	-
7	BBPOM di Semarang	2015	3	10	10	0	0	22.858.098	22.858.098	-
		2017	5	11	11	0	0	9.611.750	9.611.750	-
		2018	4	16	14	2	0	5.257.557	5.257.557	-
8	BBPOM di Yogyakarta	2014	9	16	16	0	0	179.790.228	179.790.228	-
		2017	7	16	16	0	0	-	-	-
		2018	6	20	19	1	0	5.500.000	5.500.000	-
9	BBPOM di Denpasar	2016	3	10	10	0	0	41.826.541	41.826.541	-
		2018	3	12	10	2	0	-	-	-
		2019	12	39	0	0	39	7.461.055	-	7.461.055
10	BBPOM di Pontianak	2014	7	18	18	0	0	109.321.215	109.321.215	-
		2015	4	7	7	0	0	7.059.740	7.059.740	-
		2016	7	13	13	0	0	4.159.000	4.159.000	-
		2018	5	18	18	0	0	4.844.081	4.844.081	-

NO	Nama Unit Kerja	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai Setor (Rp)	Telah Setor (Rp)	Kurang (Lebih) Setor (Rp)
		2019	5	19	7	12	0	10.216.700	10.216.700	-
11	BPOM di Gorontalo	2014	8	22	22	0	0	19.517.985,00	19.517.985,00	-
		2015	4	10	10	0	0	13.537.005,00	13.537.005,00	-
		2016	7	15	15	0	0	-	-	-
		2018	5	13	13	0	0	-	-	-
12	BPOM di Mamuju	2017	7	14	14	0	0	6.575.000	6.575.000	-
		2018	6	16	6	10	0	321.380.819	-	316.820.820
		2019	6	17	0	11	6	750.068.221	0	750.068.221
13	BBPOM di Manado	2014	7	16	16	0	0	12.667.504	12.667.504	-
		2015	6	15	15	0	0	29.073.935	29.073.935	-
		2016	6	22	21	1	0	23.345.011	29.073.935	-
		2018	4	22	22	0	0	-	-	-
		2019	7	17	17	0	0	-	-	-
14	BBPOM di Kendari	2013	9	25	25	0	0	74.315.471	74.315.471	-
		2014	9	20	20	0	0	149.251.652	149.251.652	-
		2015	3	7	7	0	0	6.310.000	6.310.000	-
		2016	7	13	13	0	0	-	-	-
		2017	3	11	10	1	0	4.850.340	488.340	4.362.000
		2018	3	15	13	2	0	10.106.760	-	10.106.760
15	BBPOM di Sofifi	2016	8	20	19	1	0	4.000.000	4.000.000	-
		2017	5	14	11	3	0	5.179.417	5.179.417	-
		2018	4	11	9	2	0	-	-	-
		2019	6	15	8	7	0	3.972.000	3.072.000	900.000

NO	Nama Unit Kerja	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai Setor (Rp)	Telah Setor (Rp)	Kurang (Lebih) Setor (Rp)
16	BBPOM di Ambon	2013	7	19	19	0	0	57.629.100	57.629.100	-
		2014	7	22	22	0	0	19.417.650	19.417.650	-
		2015	5	13	13	0	0	6.981.900	6.981.900	-
		2016	8	15	15	0	0	4.914.206	4.914.206	-
		2017	5	12	12	0	0	820.400	820.400	-
		2018	4	7	7	0	0	24.684.182	24.684.182	-
		2019	7	20	19	1	0	2.310.070	2.310.070	-
17	BBPOM di Jayapura	2013	9	25	25	0	0	10.784.650	10.784.650	-
		2015	5	11	10	0	0	33.287.000	34.191.582	(904.582)
		2016	5	12	12	0	0	15.783.252	15.783.252	-
		2017	2	3	3	0	0	-	-	-
		2018	4	22	21	1	0	45.575.184	7.855.184	37.720.000
		2019	6	24	22	2	0	4.788.000	4.788.000	-
18	Dit. Insert OT, Kos, SM	2015	3	2	2	0	0	-	-	-
19	Dit. Insert Pangan	2015	5	1	1	0	0	-	-	-
20	Biro Hukor	2016	4	13	13	0	0	-	-	-
		2018	3	5	3	2	0	-	-	-
21	Biro HDSP	2018	3	3	3	0	0	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>468</b>	<b>1302</b>	<b>1075</b>	<b>87</b>	<b>139</b>	<b>2.834.536.073</b>	<b>1.406.708.571</b>	<b>1.398.477.335</b>
	<b>Persentase</b>				<b>82,57%</b>	<b>6,68%</b>	<b>10,68%</b>		<b>49,63%</b>	<b>49,34%</b>

**Lampiran 14 - Realisasi Pelatihan Pegawai Inspektorat Tahun 2019**

**Realisasi Pelatihan Pegawai Inspektorat Tahun 2019**

No	Nama Pegawai	Nama Diklat	Penyelenggara	Waktu	Jamlat	Ket
1	Dra. Zulaimah, Apt, M.Si	Pelatihan Lead Auditor ISO 9001:2015	BSI	25-29 Maret 2019	50	Sesuai standar
		Diklat Pemeriksaan Kinerja	Badan Diklat PKN BPK-RI	18-21 Juni 2019	40	
		ISO 37001 : 2016 <i>Anti Bribery Management System</i>	Talavera (BSI)	8 – 9 Agustus 2019	20	
		ISO 31000 : 2018 <i>Risk Management System</i>	Talavera (BSI)			
2	Ir. Noviana Susanti	Pelatihan Lead Auditor ISO 9001:2015	BSI	25-29 Maret 2019	50	Sesuai standar
		Diklat Pemeriksaan Kinerja	Badan Diklat PKN BPK-RI	18-21 Juni 2019	40	
		Pelatihan Manajer Sebagai Pemimpin	Eclat	12 – 13 September 2019	20	
		ISO 31000 : 2018 <i>Risk Management System</i>			20	
3	Moch. Fachrul Rizal, SH	Pelatihan Lead Auditor ISO 9001:2015	BSI	25-29 Maret 2019	50	Sesuai standar
		Diklat Pemeriksaan Kinerja	Badan Diklat PKN BPK-RI	18-21 Juni 2019	40	
		Pelatihan Manajer Sebagai Pemimpin	Eclat	12 – 13 September 2019	20	
4	Atiek Supardiati Eka, S.Si, Apt, MKM	Pelatihan Lead Auditor ISO 9001:2015	BSI	25-29 Maret 2019	50	Sesuai standar
		Diklat Pemeriksaan Kinerja	Badan Diklat PKN BPK-RI	18-21 Juni 2019	40	
		Pelatihan Manajer Sebagai Pemimpin	Eclat	12 – 13 September 2019	20	
5	Agus Sulisno, S.Si, Apt	Pelatihan Lead Auditor ISO 9001:2015	BSI	25-29 Maret 2019	50	Sesuai standar
		Diklat Pemeriksaan Kinerja	Badan Diklat PKN BPK-RI	18-21 Juni 2019	40	
		Pelatihan Manajer Sebagai Pemimpin	Eclat	12 – 13 September 2019	20	
		ISO 37001 : 2016 <i>Anti Bribery Management System</i>	Talavera (BSI)	8 – 9 Agustus 2019	20	
6	Moh Nur Herman Syah, S.Farm, Apt	Pelatihan Lead Auditor ISO 9001:2015	BSI	25-29 Maret 2019	50	Sesuai standar
		Diklat Pemeriksaan Kinerja	Badan Diklat PKN BPK-RI	18-21 Juni 2019	40	
		<i>Certified Forensic Auditor (CfraA)</i>			30	
7	Mahardhika Hestingtyas, S.Farm, Apt	Pelatihan Lead Auditor ISO 9001:2015	BSI	25-29 Maret 2019	50	Sesuai standar
		Workshop Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan (PIPK)	Kemkeu & Badan POM	2-4 Mei 2019	30	
		Diklat Pemeriksaan Kinerja	Badan Diklat PKN	18-21 Juni 2019	40	

No	Nama Pegawai	Nama Diklat	Penyelenggara	Waktu	Jamlat	Ket
			BPK-RI			
		Pelatihan Manajer Sebagai Pemimpin	Eclat	12 – 13 September 2019	20	
		Workshop Antisipasi OTT dalam rangka Tindak Pidana Korupsi			20	
8	Farizka Dhian W, SH	Pelatihan Lead Auditor ISO 9001:2015	BSI	25-29 Maret 2019	50	Sesuai standar
		Diklat Pemeriksaan Kinerja	Badan Diklat PKN BPK-RI	18-21 Juni 2019	40	
		Pelatihan Manajer Sebagai Pemimpin	Eclat	12 – 13 September 2019	20	
9	Wikan Yogi P, SE	Pelatihan Lead Auditor ISO 9001:2015	BSI	25-29 Maret 2019	50	Sesuai standar
		Diklat Pemeriksaan Kinerja	Badan Diklat PKN BPK-RI	18-21 Juni 2019	40	
		ISO 37001 : 2016 <i>Anti Bribery Management System</i>	Talavera (BSI)	8 – 9 Agustus 2019	20	
		Pelatihan Manajer Sebagai Pemimpin	Eclat	12 – 13 September 2019	20	
10	Fadhila Nurfida Hanif, S.Farm, Apt	Diklat Penjenjangan Auditor Muda	Pusdiklatwas BPKP	2 April – 3 Mei 2019	180	Sesuai standar
11	Brigitta Melati IO	Diklat Penjenjangan Auditor Muda	Pusdiklatwas BPKP	2 April – 3 Mei 2019	180	Sesuai standar
12	Dedi Gunawan, S.TP	Diklat Pemeriksaan Kinerja	Badan Diklat PKN BPK-RI	18-21 Juni 2019	40	Sesuai standar
		<i>Certified Risk Management Officer (CRMO)</i>	RAP	2-5 Desember 2019		
13	Istiqomah, S.Si	Diklat Pemeriksaan Kinerja	Badan Diklat PKN BPK-RI	18-21 Juni 2019	40	Sesuai standar
		<i>Certified Risk Management Officer (CRMO)</i>	RAP	2-5 Desember 2019		
14	Elida Sari Silalahi, SE	Diklat Pemeriksaan Kinerja	Badan Diklat PKN BPK-RI	18-21 Juni 2019	40	Sesuai standar
		<i>Certified Risk Management Officer (CRMO)</i>	RAP	2-5 Desember 2019		
15	Ardianto Nugroho, S.Farm, Apt	Diklat Pemeriksaan Kinerja	Badan Diklat PKN BPK-RI	18-21 Juni 2019	40	Sesuai standar
		<i>Certified Risk Management Officer (CRMO)</i>	RAP	2-5 Desember 2019		
16	Edho Nilantha Yudha, SE	Diklat Sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen	Badan POM & Kemkeu	23 – 27 September 2019	42	Sesuai standar
17	Indra Ramadhani, SE	Pembentukan Auditor Ahli	Pusdiklatwas BPKP	26 Maret – 14 Mei 2019	180	Sesuai standar
18	Fernando Nainggolan, SE	Pembentukan Auditor Ahli	Pusdiklatwas BPKP	26 Maret – 14 Mei 2019	180	Sesuai standar
19	Yahya Rikaro Utomo, S.AP	Pembentukan Auditor Ahli	Pusdiklatwas BPKP	26 Maret – 14 Mei 2019	180	Sesuai standar
20	Ardhian Triwiratno, SE	Pembentukan Auditor Ahli	Pusdiklatwas BPKP	26 Maret – 14 Mei 2019	180	Sesuai standar
21	Achmad Bagus Yustiawan, SE	Pembentukan Auditor Ahli	Pusdiklatwas BPKP	26 Maret – 14 Mei 2019	180	Sesuai standar
22	Muhammad Deflyansah, SE	<i>Interpersonal Softkills</i>	PPM Manajemen	9 – 10 Oktober 2019	20	Sesuai

No	Nama Pegawai	Nama Diklat	Penyelenggara	Waktu	Jamlat	Ket
		Pelatihan Orientasi CPNS Badan POM	PPSDM	2 – 22 Maret 2019	143	standar
		Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	PPSDM	1 April – 26 Juni 2019	511	
23	Lilis Dyan Tika, S. E	<i>Interpersonal Softkills</i>	PPM Manajemen	13 – 14 Nopember 2019	20	Sesuai standar
		Pelatihan Orientasi CPNS Badan POM	PPSDM	2 – 22 Maret 2019	143	
		Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	PPSDM	16 September 2019 s.d 28 November 2019	511	
24	Nurmamispa Hanani, S.Kom	<i>Interpersonal Softkills</i>	PPM Manajemen	13 – 14 Nopember 2019	20	Sesuai standar
		Pelatihan Orientasi CPNS Badan POM	PPSDM	2 – 22 Maret 2019	143	
		Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	PPSDM	16 September 2019 s.d 28 November 2019	511	
25	Fikri Jalalluddin, S.Stat	<i>Interpersonal Softkills</i>	PPM Manajemen	13 – 14 Nopember 2019	20	Sesuai standar
		Pelatihan Orientasi CPNS Badan POM	PPSDM	2 – 22 Maret 2019	143	
		Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	PPSDM	16 September 2019 s.d 28 November 2019	511	
26	Mareta Rifani, S.I.P	<i>Interpersonal Softkills</i>	PPM Manajemen	13 – 14 Nopember 2019	20	Sesuai standar
		Pelatihan Orientasi CPNS Badan POM	PPSDM	2 – 22 Maret 2019	143	
		Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	PPSDM	16 September 2019 s.d 28 November 2019	511	

Ket:

\*) Sesuai standar jika kegiatan diklat/pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun

**Lampiran 15 - Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2019**

**Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2019**

No.	Proses	Nilai		Indeks RB	%
		Instansi	Unit*		
1	Manajemen perubahan	2,47	2,15	4,62	92,3%
2	Penataan peraturan perundang-undangan	2,81	0,89	3,70	73,96%
3	Penataan dan penguatan organisasi	4,50	1,50	6,00	100,00%
4	Penataan tata laksana	2,73	1,81	4,54	90,72%
5	Penataan sistem manajemen SDM	11,50	3,32	14,82	98,83%
6	Penguatan akuntabilitas	2,84	2,73	5,57	92,81%
7	Penguatan pengawasan	6,18	4,97	11,15	92,90%
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1,45	4,32	5,77	96,14%
<b>Total Proses (60)</b>		34,46	21,69	56,16	93,60%

No.	Hasil	Nilai		Indeks RB	%
		Instansi	Unit**		
1	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi (20)	16,05	-	16,05	80,26%
2	Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN (10)	9,42	-	9,42	94,23%
3	Kualitas pelayanan publik (10)	8,80	-	8,80	88,00%
<b>Total Hasil (40)</b>		34,27	-	34,27	85,69%
<b>Indeks RB (100)</b>		<b>90,43</b>			

Keterangan:

\* Nilai Total Proses RB tingkat Unit merupakan rata-rata dari Nilai RB masing-masing Unit Kerja Eselon I

\*\* Nilai Total Hasil RB hanya dilakukan pada tingkat instansi

**Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  
Unit Kerja Eselon I Badan POM  
Tahun 2019**

No.	Proses	Nilai		Indeks RB	%
		Instansi	Unit*		
1	Manajemen perubahan	2,47	2,15	4,62	92,3%
2	Penataan peraturan perundang-undangan	2,81	0,89	3,70	73,96%
3	Penataan dan penguatan organisasi	4,50	1,50	6,00	100,00%
4	Penataan tata laksana	2,73	1,81	4,54	90,72%
5	Penataan sistem manajemen SDM	11,50	3,32	14,82	98,83%
6	Penguatan akuntabilitas	2,84	2,73	5,57	92,81%
7	Penguatan pengawasan	6,18	4,97	11,15	92,90%
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1,45	4,32	5,77	96,14%
<b>Total Proses (60)</b>		34,46	21,69	56,16	93,60%

No.	Hasil	Nilai		Indeks RB	%
		Instansi	Unit**		
1	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi (20)	16,05	-	16,05	80,26%
2	Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN (10)	9,42	-	9,42	94,23%
3	Kualitas pelayanan publik (10)	8,80	-	8,80	88,00%
<b>Total Hasil (40)</b>		34,27	-	34,27	85,69%
<b>Indeks RB (100)</b>		<b>90,43</b>			